

BAB 2

DINAMIKA INVESTASI INTRA-ASEAN

Guna menjawab pertanyaan penelitian di Bab 1, pertama-tama perlu digali aspek-aspek yang memengaruhi terjadinya dinamika investasi intra-ASEAN. Dinamika investasi intra-ASEAN mencakup dimensi yang luas, melibatkan aktor Pemerintah, aktor non-negara yaitu perusahaan dan juga faktor eksternal kawasan. Hal-hal tersebut akan diuraikan pada Bab II ini. Dari segi Pemerintah, dinamika investasi intra-ASEAN sudah dimulai sejak kesepakatan berdirinya ASEAN ditandatangani. Sementara bagi kalangan dunia usaha, dimulai ketika mulai terjadi investasi oleh badan usaha suatu negara ASEAN di negara ASEAN lainnya. Praktis hal tersebut telah terjadi tak lama setelah ASEAN berdiri. Di akhir 1960-an banyak perusahaan perkayuan Filipina menamakan modalnya di Indonesia⁶¹. Sementara di awal 1970-an, pengusaha Indonesia Tong Dju mulai berinvestasi di Singapura.

Sejak awal pendirian ASEAN, Pemerintah negara-negara ASEAN sudah melihat urgensi investasi intra-ASEAN. Baik dalam dimensi politis, sebagai simbol solidaritas kawasan untuk saling memberi dan berbagi, maupun dimensi praktis, karena posisi masing-masing negara yang memerlukan FDI sebagai modal pembangunan ekonomi yang saat itu didominasi sumber luar kawasan. Adalah hal yang positif ketika para pemimpin ASEAN melihat negaranya masing-masing dan negara-negara tetangga di kawasan sebagai sumber dari FDI. Pada periode awal ini, negara-negara ASEAN masih terbatas kapasitas ekonominya, sehingga FDI dari luar kawasan adalah andalan utama, dan FDI intra-ASEAN adalah alternatif yang diharapkan tumbuh dimasa depan.

Investasi telah sejak awal dipahami negara-negara di kawasan ASEAN sebagai komponen dalam pembangunan ekonomi. Negara-negara ASEAN, secara individual, telah mengembangkan berbagai kebijakan yang lebih progresif untuk menarik FDI sejak awal 1990-an⁶². ASEAN adalah salah satu kawasan yang

⁶¹ <http://unctc.unctad.org/data/stescap331e.pdf>, diakses tanggal 17 Mei 2009.

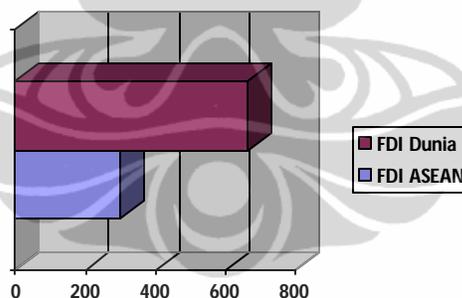
⁶² Rahmat Dwi Saputra, *op.cit.*, hal. 173 - 182.

paling sukses menarik FDI global. Di tahun 2007 menyerap 69,9 miliar dollar AS⁶³.

Kesuksesan menarik FDI telah membuat ekonomi kawasan ASEAN tumbuh dan lebih maju. Sebagaimana diuraikan di Bab 1, ASEAN-5 telah muncul sebagai negara-negara sumber FDI yang tidak dapat diremehkan. Posisi baru tersebut, memunculkan harapan akan peningkatan investasi intra-ASEAN. Karena investasi adalah kebutuhan pembangunan setiap negara di kawasan, FDI intra-ASEAN adalah wujud nyata semangat ASEAN untuk saling mendukung.

Namun, perlu diperhatikan adanya kendala situasi yang dihadapi ASEAN. Tingkat dan kapabilitas ekonomi ASEAN-5 umumnya memang masih terbatas, dan karenanya, potensi investasi intra-ASEAN memang belum terlalu besar mengingat status ekonominya. Andaikan seluruh stok OFDI ASEAN yang sebesar 301,63 miliar dollar AS ditempatkan di ASEAN, nilainya baru mencapai 45,48% dari stok seluruh FDI yang masuk ke ASEAN yang tercatat 663,21 miliar dollar AS (lihat Diagram 2.1).

Diagram 2.1
Perbandingan FDI Dunia ke ASEAN dan Total OFDI ASEAN
(Stok 2008, dalam miliar Dollar AS)



Sumber: Data diolah dari Asean FDI Database 2008 dan UNCTAD Statistic Handbook 2009

Sehingga yang dimaksudkan dengan peningkatan proporsi investasi intra-ASEAN adalah pertama, peningkatan alokasi OFDI tiap negara ASEAN-5 ke negara ASEAN lainnya. Dalam konteks ini adalah realistis untuk mengharapkan 30% dari OFDI negara-negara ASEAN-5 ditempatkan di kawasan ASEAN. Kedua, peningkatan porsi FDI intra-ASEAN terhadap seluruh FDI yang masuk ke

⁶³ Asean Investment Report, 2009*

kawasan ASEAN. Catatannya adalah makin banyak FDI luar kawasan yang masuk, maka FDI intra-kawasan juga harus meningkat lebih tinggi lagi.

2.1. Investasi Intra-ASEAN: Perkembangan Pendekatan Multilateral Dari Waktu ke Waktu

Dari waktu-kewaktu, Pemerintah negara-negara ASEAN-5 telah mengambil berbagai langkah untuk memajukan kegiatan investasi intra-ASEAN.

Dalam konteks kerjasama ekonomi dimana isu investasi menjadi bagian didalamnya, ASEAN memiliki beberapa skema utama kerjasama ekonomi. Yaitu: *ASEAN Free Trade Area, ASEAN Growth Triangles, ASEAN Industrial Cooperation, ASEAN Investment Area, ASEAN Services Framework Agreement*⁶⁴.

Namun, semuanya diawali dengan penandatanganan kesepakatan ASEAN *Preferential Trading Arrangements* (PTA) pada 25 Februari 1977 di Manila⁶⁵. PTA adalah pengaturan perdagangan yang dianggap akan menjadi stimulus untuk memperkuat perekonomian negara-negara ASEAN dengan memperluas peluang investasi dan produksi, perdagangan dan penerimaan devisa. PTA adalah titik awal dari penggunaan strategi peningkatan perdagangan intra-ASEAN untuk meningkatkan investasi intra-ASEAN. Naskah *Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements*⁶⁶ menyatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan PTA dibuat agar negara-negara anggota dapat bekerjasama dalam pengembangan komoditi dasar, khususnya makanan dan energi; mempersiapkan dukungan pasar bagi produk dari *ASEAN Industrial Project* (AIP), peningkatan perdagangan intra-ASEAN dan meningkatkan pemanfaatan bahan mentah di negara-negara anggota. Perjanjian PTA mencakup beberapa instrumen. Yaitu: kontrak jangka panjang, pembelian/pembayaran dukungan finansial pada tingkat bunga preferensial; preferensi dalam pembelian entitas Pemerintah, perpanjangan tarif preferensi; dan liberalisasi perlakuan non-tarif pada basis preferensial.

⁶⁴ Chia Siouw Yue, *The Indonesia-Malaysia-Singapore Growth Triangle*, (Singapura: Presentasi Director Institute of South East Asian Studies), www.cpu.gov.hk/english/documents/conference/e-sychia.rtf, diakses tanggal 2 Februari 2010.

⁶⁵ Joko Siswanto dan Aditya Rachmanto, *Menuju Kawasan Bebas Aliran Barang Asean 2015*, Masyarakat Ekonomi Asean 2015, *op.cit.*, hal. 85-86

⁶⁶ <http://www.asean.sec.org/2348.htm> diakses tanggal 28 Desember 2009.

Dalam periode 70-an dan 80-an isu investasi intra-ASEAN, ditandai dengan keterlibatan langsung negara dalam kegiatan investasi intra-ASEAN. Wujudnya berupa ASEAN *Industrial Projects* (AIPs). Termasuk dalam kegiatan AIPs ini adalah ASEAN Urea Project di Indonesia (diresmikan pada tahun 1983) dan Urea Project di Malaysia (diresmikan tahun 1985). Proyek lainnya adalah proyek pabrikasi tembaga ASEAN di Filipina. Di Thailand ada proyek ASEAN Rock Salt Soda Ash yang disponsori oleh Pemerintah Thailand dan mengundang sektor swasta ASEAN. ASEAN *Industrial Joint Ventures* (AIJV) yang disetujui dalam ASEAN *Economic Minister Meeting* yang ke empat belas di Singapura pada tanggal 11-13 November 1982⁶⁷, menyepakati pembentukan sebuah skema kerjasama industri, yang utamanya ditujukan pada sektor swasta.

Sementara itu, sektor swasta mulai disentuh pada periode 1980-an. (AIJV) adalah kemajuan berarti dalam kerjasama industri ASEAN. Skema tersebut adalah skema utama dari kerjasama industri ASEAN, melengkapi AIP dan ASEAN *Industrial Complementation* (AIC). Skema AIJV dikembangkan berdasarkan pengalaman AIP dan AIC.

Baik *the ASEAN Industrial Project* (AIP) dan program *ASEAN Industrial Complementary* (AIC) adalah upaya rintisan melalui pendekatan yang *top-down* yang kemudian terbukti tak cukup menarik sektor swasta. Skema AIJV bertujuan untuk menyediakan panduan dan kerangka institusional baik di dalam sektor pemerintahan maupun swasta ASEAN agar dapat berkolaborasi untuk mengidentifikasi peluang, memformulasikan program dan mendesain proyek *joint venture* yang saling menguntungkan. AIJV juga bertujuan meningkatkan produksi industri bagi kawasan sebagai satu kesatuan. AIJV dianggap memiliki keunggulan karena terbuka bagi proyek investor swasta dengan minimum hanya dua negara partisipan untuk semua empat produk yang dipromosikan dalam skema AIC dan *provision* bagi penundaan dari PTA *preferensial rights* dari negara-negara non anggota. Pendekatan baru di atas dihasilkan dalam KTT ASEAN Ketiga pada tahun 1987 dengan menyediakan skema pembiayaan yang lebih menarik. Namun skema AIJV juga berujung dengan hasil yang relatif mengecewakan, karena

⁶⁷ <http://www.asean.org/10746.htm>, diakses tanggal 28 Desember 2009.

faktor-faktor birokrasi, beberapa kerancuan hukum nasional dan regional serta kurangnya promosi⁶⁸.

Perkembangan selanjutnya dicapai tahun 1987 dengan disepakatinya ASEAN *Promotion and Protection of Investment Agreement* atau perjanjian ASEAN untuk Promosi dan Perlindungan Investasi (PAPPI). Tujuan PAPPI adalah mempercepat proses industrialisasi yang terjadi dikawasan yang antara lain dilakukan melalui promosi dan perlindungan investor⁶⁹.

Sejak awal 1990-an, pemerintah negara-negara ASEAN telah bergerak pada formalisasi *preferential agreements*. Hal ini adalah bagian dari respon terhadap perubahan signifikan dalam tataran politik global. Di Januari 1992, para pemimpin ASEAN mengadopsi kesepakatan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yang akan membimbing pada pendirian AFTA⁷⁰. Menurut forum *ASEAN Ministerial Meeting* (1991), daya kompetisi ASEAN dalam menarik modal dan investasi ditantang beberapa peristiwa di akhir 80-an dan awal 90-an. Yaitu munculnya China sebagai rival, munculnya Eropa Timur bekas blok Soviet dalam peta investor, rekonstruksi di bekas negara Uni Sovyet, potensi pengalihan investasi karena menguatnya integrasi Eropa sejak 1992, dan pembentukan NAFTA yang dapat membuat investasi AS dan Kanada lebih memilih Meksiko.

Paul Bowles⁷¹ menyebutkan bahwa pendirian AFTA yang dirancang tahun 1991 dan menjadi efektif 1 Januari 1993, merupakan upaya paling ambisius dari kerjasama ASEAN dibidang ekonomi sejak didirikan tahun 1967. AFTA mengadopsi gagasan regionalisme terbuka, yang berarti menggunakan regionalisme kawasan untuk menapaki integrasi dengan ekonomi global sebagai tahap selanjutnya. Selain itu, pendirian AFTA juga dilakukan untuk meningkatkan pendapatan dari ekspor.

Banyak negara ASEAN berjuang untuk meningkatkan ekspor sejak periode 80-an sebagai respon terhadap krisis utang yang muncul diawal dekade itu. Guna

⁶⁸ Michael G. Plummer dan David Cheong, *FDI Effect of Asean Integration*, (The John Hopkins University, SAIS-Bologna, Paper Prepared for: Is Free Trade Still Relevant in the 21st Century? A Conference Celebrating Professor Rachel Mcculloch, International Business School, Brandeis University, 15 Juni 2007), http://people.brandeis.edu/~cbown/conferences/mcculloch/Plummer_Cheong.pdf, diakses tanggal 5 Februari 2009.

⁶⁹ Joko Siswanto dan Aditya Rachmanto, *op.cit.*, hal. 91.

⁷⁰ Wendy Dobson, *op.cit.*, hal. 11.

⁷¹ Paul Bowles, *op.cit.*, hal. 233.

mencapai tujuan meningkatkan ekspor tersebut, ASEAN-4 (Indonesia, Thailand, Filipina dan Malaysia) mengikuti nasehat dari institusi finansial internasional untuk secara sendiri-sendiri melakukan liberalisasi perdagangan, dan mengambil kebijakan yang lebih mendukung peningkatan ekspor. Sebagai tambahannya, setiap negara mengadopsi kebijakan yang lebih menarik FDI dalam upaya untuk melanjutkan proses industrialisasi. Kebijakan ini telah membuka kesempatan pada perusahaan Jepang untuk melakukan ekspansi dengan deras ke negara-negara ASEAN setelah Plaza Accord 1985 yang membuat nilai mata uang Yen terapresiasi sangat tinggi. Hal ini nampak dari pertumbuhan FDI Jepang antara 1985-1989 yang mencapai 62% pertahunnya. Pada masa yang sama, negara-negara NIC's Asia Timur juga melakukan banyak investasi di ASEAN-4 dan China. Proporsi FDI terhadap GDP ASEAN-4 meningkat tajam dan hal ini meningkatkan kesadaran ASEAN sebagai sebagai tujuan investasi yang harus mempertahankan daya kompetitifnya untuk menarik modal dan investasi⁷².

Sebuah kesepakatan ekonomi regional saat itu dilihat sebagai jalan terbaik untuk mempertahankan daya tarik investasi ASEAN dan untuk mendorong kelanjutan integrasi kawasan dalam aspek perdagangan dan arus modal global.

Kelahiran APEC juga menjadikan ASEAN perlu mencari terobosan untuk menjadikan dirinya tetap relevan. Ada motif politik disini. Hal ini bukanlah hal yang aneh, karena proyek regional selalu memiliki dimensi politik sebagai hal yang utama. Dapat disimpulkan bahwa pembentukan AFTA sebagian besar adalah respon atas perubahan lingkungan eksternal dan khususnya kekhawatiran mengenai terjadinya pengalihan investasi.

Pembentukan AFTA⁷³, adalah upaya kolektif negara-negara ASEAN untuk mendorong liberalisasi rezim investasi dalam rangka mewujudkan ASEAN sebagai kawasan pasar regional yang terintegrasi, terbuka dan kompetitif, sehingga dapat menarik PMA secara berkesinambungan. Dengan AFTA, acuan margin keuntungan (*margin of preference*) dalam skema AIJV menjadi tumpang tindih. Disatu sisi, ada program transisi yang dijalankan sebagai buah kesepakatan ASEAN *Industrial Cooperation Scheme* (AICO) ditahun 1996 yang secara resmi

⁷² *Ibid.*, hal. 234.

⁷³ Rahmat Dwi Saputra, *op.cit.*, hal. 173-182

menggantikan kesepakatan dasar AIJV (15 desember 1987) dan MOU mengenai skema *Brand-to-Brand Complementation* (BBC) pada tanggal 18 Oktober 1988. AICO mereduksi tarif preferensial menjadi antara 0-5% dan akan memberikan keuntungan lain berupa *guaranteed rapid turnaround on applications*, referensi untuk perselisihan dan keuntungan dalam arti aturan pembatasan *equity* yang lebih liberal bagi investor asing. Skema ini terutama populer dalam lingkungan integrasi vertikal dari produksi komponen otomotif dan elektronik⁷⁴.

Upaya yang paling signifikan di dalam lingkup investasi adalah inisiatif untuk membentuk ASEAN *Investment Area* (AIA) pada 7 Oktober 1998. Kebijakan ini sama sekali baru, bukan pengembangan dari kerangka-kerangka sebelumnya termasuk AFTA dan AICO. AIA didesain untuk mencapai harmonisasi kebijakan FDI yang mencakup liberalisasi, promosi, dan model fasilitasi investasi tertentu di antara negara-negara ASEAN. Ada lima sektor unggulan, yaitu manufaktur, pertanian, perikanan, pertambangan, dan penambangan.

The Framework on the ASEAN Investment Area (AIA) yang ditandatangani pada 7 oktober 1998 merupakan inisiatif dibidang investasi yang bertujuan mewujudkan ASEAN sebagai kawasan investasi yang menarik, kompetitif, terbuka dan bebas dalam rangka menarik dan meningkatkan arus PMA baik dari luar maupun dalam kawasan secara berkesinambungan. Perjanjian ini mengikat negara anggota untuk secara progresif mengurangi atau menghapus peraturan, kebijakan dan kondisi yang dapat menghambat masuknya arus investasi dan memastikan pelaksanaannya dalam kurun waktu yang telah disepakati. Dalam rangka implementasi AIA dibentuk ASEAN *Coordinating Committee on Investment*. Komite tersebut bekerja dengan tiga pendekatan, yaitu: (i) Kerja sama dan program – program fasilitas dalam rangka meningkatkan daya saing ASEAN dan menyediakan lingkungan investasi yang efisien dan biaya transaksi yang rendah, (ii) Program – program promosi dan *awareness* ASEAN sebagai *a single investment destination* dan (iii) Program liberalisasi untuk menciptakan rezim investasi yang bebas⁷⁵.

⁷⁴ Michael G. Plummer dan David Cheong, *op.cit.*, http://people.brandeis.edu/~cbown/conferences/mcculloch/Plummer_Cheong.pdf, diakses tanggal 5 Februari 2009.

⁷⁵ <http://www.aseansec.org/ar04/chapter%202-a.pdf>., diakses tanggal 28 Februari 2009.

Daisuke Hiratsuka⁷⁶, menyebutkan bahwa keputusan untuk menciptakan *ASEAN Economic Community* (AEC) ditahun 2020 pada KTT ASEAN ke sembilan pada Oktober 2003 adalah sebuah pijakan baru bagi kerjasama ekonomi ASEAN. Upaya mewujudkan AEC kemudian diajukan ke tahun 2015. Rejim investasi yang terbuka dan bebas dianggap faktor kunci dalam meningkatkan daya saing ASEAN untuk menarik FDI baik ekstra maupun intra-kawasan sehingga salah satu pilar dalam pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015, adalah arus investasi yang bebas bersamaan dengan arus barang, jasa, dan tenaga kerja ahli yang bebas serta arus modal yang lebih bebas. Kawasan ASEAN didesain sebagai pasar bersama (kesatuan ekonomi) dan kesatuan basis produksi⁷⁷. Potensi ASEAN seperti skala ekonomi, jumlah populasi, letak yang strategis, kekayaan sumber daya alam tenaga kerja yang berlimpah, potensi pasar, serta kebijakan ekonomi terbuka merupakan modal ASEAN sebagai kesatuan basis produksi internasional dan tujuan investasi yang menarik. FDI *inflow* dianggap sebagai bagian yang sangat menentukan integrasi ASEAN. Merangsang FDI *inflows* yang terkait dengan kegiatan MNC di kawasan selalu menjadi tujuan eksplisit dari setiap kerjasama ekonomi ASEAN.

Investasi akan meningkatkan pendapatan baik secara langsung melalui peningkatan kapital untuk produksi maupun secara tidak langsung melalui kemajuan teknologi. Membesarkan multinasional multinasional dianggap dapat dilakukan bersamaan dengan pembangunan kawasan itu sendiri.

Berbeda dengan pendekatan-pendekatan sebelumnya, kerangka MEA memiliki cetak biru pilar investasi yang memuat prinsip-prinsip utama, langkah-langkah promosi, kerjasama dan liberalisasi investasi lengkap dengan “target waktu” pencapaiannya. Target pencapaiannya terbagi dalam empat tahap. Yaitu 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015.⁷⁸

Posisi investasi intra-ASEAN juga mendapat perhatian khusus dalam skema MEA. Untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam menarik FDI intra-ASEAN akan ditempuh strategi penciptaan rezim investasi yang bebas dan

⁷⁶ Michael G. Plummer dan David Cheong, *op.cit.*, http://people.brandeis.edu/~cbrown/conferences/mcculloch/Plummer_Cheong.pdf, diakses tanggal 5 Februari 2009.

⁷⁷ Rahmat Dwi Saputra, *op.cit.*, hal 186-204

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 186-204 .

terbuka di ASEAN. Aliran investasi baru dan re-investasi yang berkelanjutan diyakini dapat mendorong dan menjamin pembangunan ekonomi yang dinamis di ASEAN. Inisiatif-inisiatif yang sudah ada, akan diimplementasikan dan lebih dikembangkan melalui serangkaian langkah promosi, kerja sama dan liberalisasi. Untuk meningkatkan integrasi dan daya saing investasi kawasan, *Framework Agreement Guarantee Agreement Investment Area (AIA)* dan *ASEAN Investment Guarantee Agreement (IGA atau PAPPI)* akan di-review dan dijadikan acuan dari pembentukan *ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)* yang disepakati pada tahun 2009. Secara konsep, ACIA memungkinkan negara anggota ASEAN untuk melakukan ekspansi investasi didalam kawasan dengan lebih mudah⁷⁹. Kepercayaan investor terhadap kawasan diharapkan meningkat melalui ACIA sebagai perjanjian investasi yang bersifat komprehensif, *forward looking international best practice*, dan terdapatnya target waktu pencapaian. ACIA akan mendorong lingkungan investasi yang lebih liberal, transparan, kompetitif serta fasilitatif, melalui empat pilar. Yaitu : perlindungan investasi, meliputi mekanisme *transfer and repatriation of capital, profits, dividends; transparen coverage on the expropriation and compensation; full protection and security; dan compensation for losses resulting from strife*. Fasilitas dan kerjasama, yang diarahkan untuk menyediakan kebijakan peraturan ketentuan dan prosedur investasi yang lebih transparan, konsisten dan *predictable*. Antara lain, penyederhanaan prosedur pendaftaran dan persetujuan investasi dan prosedur investasi melalui *one-stop investment centre*. Promosi dan kepedulian (*promotion and awareness*), bertujuan untuk mendorong pembentukan ASEAN sebagai kawasan investasi terpadu dan jejaring produksi. Beberapa langkah yang diambil antara lain menciptakan lingkungan yang kondusif untuk semua jenis investasi ; mempromosikan investasi intra ASEAN, khususnya investasi dari ASEAN-6 ke negara Kamboja, Laos, PDR, Myanmar dan Vietnam (CLMV); mempromosikan pengembangan dan pertumbuhan *small medium enterprises (SMEs)* dan *multi national Enterprises (MNEs)*. Secara berkesinambungan sampai dengan 2015,

⁷⁹ *ASEAN Investment Agencies Teaming Up to Lure more FDI from Outside Region*, (Bangkok: The Nation, 2 November 2009), <http://www.nationmultimedia.com/home/apps/print.php/newsid=30115692>, diakses tanggal 19 Februari 2010.

program-program promosi dilakukan dengan berbagai kegiatan publikasi dan diseminasi investasi, pengembangan jejaring badan promosi di ASEAN, melakukan konsultasi dengan sektor bisnis, dan mengembangkan industrial *cluster database* serta menyelenggarakan *ASEAN Investor Seminar*. Sementara komitmen liberalisasi yang progresif, dicapai melalui serangkaian tindakan yaitu: (i) memperluas *non-discriminatory treatment* termasuk *national treatment* dan *most-favoured nation treatment* kepada seluruh investor di ASEAN dengan pengecualian seminimal mungkin; bahkan jika memungkinkan menghilangkan pengecualian- pengecualian, (ii) menghilangkan pembatasan masuk atas investasi di sektor-sektor prioritas dalam integrasi ekonomi yang terkait perdagangan barang, serta mengurangi bahkan jika memungkinkan menghilangkan kebijakan yang menghalangi investasi pada sector-sektor yang dibatasi (*restrictive*); dan (iii) mengurangi bahkan jika perlu menghilangkan hambatan investasi dalam bentuk *performance requirements*. Selain itu, tahapan liberalisasi investasi juga terkait dengan pilar aliran modal yang lebih bebas, termasuk FDI. Asesmen peraturan yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa aliran FDI masuk sudah cukup liberal dan masih adanya pembatasan pada aliran modal keluar. Dengan ACIA, *ASEAN based investor* akan lebih luas, tidak hanya mencakup *ASEAN owned companies*. Hal ini, sekali lagi menunjukkan perlakuan istimewa pada investasi non-ASEAN, meskipun ACIA akan memberikan kesempatan bagi lebih banyak korporasi negara ASEAN untuk beroperasi di sesama negara ASEAN dan meraih status korporasi multinasional ASEAN.

Agar kawasan ASEAN menjadi tujuan investasi yang menarik dalam jangka waktu tertentu sekaligus mencegah terjadinya perang insentif antarnegara anggota, maka AIA antara lain mengambil langkah-langkah untuk mengoordinasikan implementasi kerja sama investasi ASEAN dan program-program fasilitas; mengimplementasikan program promosi terpadu dan kegiatan-kegiatan kepedulian investasi (*investment awareness*); membuka semua industri (manufaktur, pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan dan *quarriying* serta jasa yang terkait dengan kelima sektor tersebut) untuk investasi dengan beberapa pengecualian yang dinyatakan dalam *Temporary Exclusion List (TEL)* dan *Sensitive List (SL)* untuk investor ASEAN pada 2010 dan semua investor pada

2020; menjamin *national treatment* (perlakuan nasional) atau perlakuan yang sama antara investor lokal; mengikutsertakan sektor swasta secara aktif dalam proses pengembangan AIA; mendorong aliran modal yang lebih bebas, tenaga kerja terampil, tenaga ahli yang profesional dan teknologi diantara para anggota; mendorong keterbukaan (*transparency*) dalam kebijakan, peraturan, prosedur dan administratif investasi diantara para anggota. Melalui langkah-langkah tersebut, investor akan memiliki berbagai keuntungan dari AIA, yaitu: akses investasi yang lebih besar terhadap sektor-sektor industri dan ekonomi, memperoleh perlakuan nasional, memperoleh peluang investasi yang lebih besar dengan adanya keterbukaan informasi dan program kepedulian investasi, rezim investasi yang lebih kompetitif dan bebas serta biaya transaksi yang lebih rendah untuk beroperasi diseluruh kawasan. Dalam pelaksanaannya, AIA telah mengalami berbagai amandemen berkaitan dengan tambahan negara anggota, penetapan sektor prioritas dan percepatan tahapan liberalisasi⁸⁰.

2.2. Perkembangan Pendekatan Skema Trilateral Dari Waktu ke Waktu

Disisi lain, model kerjasama sub-regional berupa segitiga pertumbuhan juga dikembangkan oleh negara-negara ASEAN, guna mendorong pertumbuhan investasi intra-ASEAN.

Menggunakan pendekatan yang disusun oleh Chia Siow Yue, segitiga pertumbuhan ASEAN yang telah dibentuk adalah⁸¹:

1. Southern IMS-GT (Indonesia-Malaysia-Singapore).
2. Northern IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand).
3. Eastern BIMP-EAGE (Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina).
4. Greater Mekong Sub-regional (GMS)

Konsep dasar dari segitiga pertumbuhan antara lain adalah untuk membangun sebuah zona ekonomi yang saling melengkapi, berdimensi transnasional/lintas negara, yang memberikan kemampuan untuk berkompetisi secara ekonomi dengan mengeksplorasi keunggulan komparatif dan skala

⁸⁰ Rahmat Dwi Saputra, *op.cit.*, hal. 173 - 209.

⁸¹ Chia Siow Yue, *op.cit.*, www.cpu.gov.hk/english/documents/conference/e-sychia.rtf diakses tanggal 2 Februari 2010.

ekonomi yang lebih besar. Faktor kedekatan geografis dianggap memberikan keuntungan-keuntungan seperti biaya transaksi, transportasi dan informasi yang lebih rendah, memudahkan produksi dan distribusi secara berjangkauan, dan lebih memungkinkan bagi terlaksananya investasi oleh *small and medium enterprises* (SME). Dalam konsep segitiga pertumbuhan di ASEAN, sektor swasta ditempatkan sebagai *driving force*, sementara pemerintah diharapkan sebagai fasilitator yang menghilangkan hambatan politik dan kebijakan, menyediakan kerangka institusional, memfasilitasi pembangunan infrastruktur fisik, menyediakan insentif untuk keterlibatan sektor swasta.

2.2.1. Kerangka Segitiga Pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT)

Dibentuk 1989 sebagai inisiatif pemimpin Indonesia dan Singapura⁸². Dari ukurannya, IMS-GT jauh lebih kecil dari zona ekonomi Hongkong-China Selatan. Keterkaitan historis kawasan Singapura-Johor-Riau dianggap menjadi modal dasar yang penting. Di awalnya, kerjasama ini hanya mencakup SIJORI (Singapura, Johor (Malaysia), dan Riau (Indonesia)). Dalam perkembangannya di sisi Malaysia ditambah dengan Negeri Sembilan, Malaka dan Pahang. Sementara di sisi Indonesia, ditambah dengan propinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung dan Kalimantan Barat. Total area IMS mencakup 334.000 km², dan 35 juta populasi. Investasi dari Singapura (termasuk MNC asing berbasis di Singapura) adalah sumber utama FDI di Batam. Sekitar 70% FDI di Batam melibatkan Singapura. Di sisi lain, 60% investasi Singapura di Malaysia ada di Johor. Antara 1990-1996, investasi Singapura di Johor mencapai 5,85 juta RM untuk 662 proyek manufaktur. Mayoritasnya adalah firma SME. Melalui IMS, Malaysia berinvestasi di perkebunan kelapa sawit di Sumatera Selatan dan Riau. Juga bekerjasama dengan Pemda Sumatera Barat membangun Padang Industrial Park di tahun 1997.

⁸² *Ibid.*, hal.2

2.2.2. Segitiga Pertumbuhan Utara Indonesia-Malaysia- Thailand (Northern IMT-GT)

Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle (IMT–GT) didirikan tahun 1993 dengan tujuan untuk mempromosikan sebuah wilayah pertumbuhan dengan skema trilateral baru dari kerjasama ekonomi sub-regional⁸³. Fokus IMT-GT adalah pada kegiatan investasi, transfer teknologi, kerjasama produksi dan pemanfaatan SDA di Thailand bagian selatan, Malaysia bagian utara dan hampir seluruh P. Sumatera di Indonesia. IMT-GT juga mencari peluang untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi di wilayah segitiga pertumbuhannya. Hingga sekarang, IMT–GT terdiri dari lima provinsi di selatan Thailand (Narathiwat, Pattani, Satun, Songkhla and Yala); lima negara bagian Malaysia (Kedah, Penang, Perak, Perlis and Selangor); dan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan Riau di Indonesia. Kerangka kerjasama IMT–GT memiliki dua mekanisme fungsional: Pertemuan Tahunan Tingkat Menteri dan Pertemuan Tahunan Pejabat Senior, dan Dewan Bisnis untuk sektor swasta.

Pada SOM dan Pertemuan Menteri dibawah kerangka IMT-GT diselenggarakan 24-26 Agustus 2004 di Propinsi Pattani, Thailand, disepakati perluasan wilayah kerjasama IMT-GT. Thailand mengusulkan tambahan Provinsi Trang, Phatthalung dan Nakhon Si Thammarat. Malaysia mengusulkan tambahan negara bagian Kelantan. Indonesia mengusulkan agar seluruh provinsinya di P.Sumatera dapat dicakup. Pertemuan juga mendorong usulan Malaysia untuk mengundang Myanmar dalam pertemuan Dewan Bisnis Trilateral sebagai pengamat, dibawah konsep IMT-GT + 1. Banyak proyek IMT-GT telah mengalami kemajuan positif disemua sektor dan banyak proyek baru juga diajukan. KTT IMT-GT kedua diselenggarakan di Filipina 12 Januari 2007 dan menyepakai adopsi IMT-GT Roadmap (2007-2011). Sementara itu Dewan Bisnis Gabungan (JBC) meminta ADB untuk memberikan konsultasi teknis dan membiayai proyek-proyek IMT-GT.

⁸³ *Economic Relations and Cooperation Division Department of International Economic Affairs August 2007*, <http://www.mfa.go.th/web/1706.php>, diakses tanggal 6 September 2009.

2.2.3. Segitiga Pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Filipina (BIMP - EAGA GT)

Segitiga pertumbuhan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Filipina *East ASEAN Growth Area* diluncurkan pada tahun 1994 sebagai inisiatif dari empat negara dengan tujuan mengakselerasikan pembangunan ekonomi pada area tertentu yang meskipun jauh dari ibu kota memiliki *strategic proximity* satu sama lainnya sebagai salah satu kawasan paling kaya sumberdaya alam di dunia⁸⁴. Kerjasama BIMP-EAGA bertujuan untuk meningkatkan perdagangan, turisme dan investasi didalam dan diluar wilayah kerjasama subregional ini.

Inisiatif BIMP-EAGA berbasis *market-driven* dan dioperasikan melalui struktur organisasi yang terdesentralisasi dengan melibatkan empat pemerintah dan sektor swasta. BIMP-EAGA meliputi area seluas 1,6 juta km² dan berpenduduk 57,5 juta jiwa. Terdiri dari seluruh wilayah Kesultanan Brunei Darussalam; Provinsi-provinsi Indonesia di P.Kalimantan, P.Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Papua; Negara Bagian Sabah dan Sarawak serta Wilayah Federal Labuan di Malaysia; P.Mindanao dan Propinsi Palawan di Filipina. EAGA memiliki potensi besar untuk memasok pasar ekspor ASEAN, Asia Selatan dan Utara dan Timur Tengah, mengikuti pengembangan koneksi jalur transportasi darat, udara dan laut dan peningkatan dukungan iklim investasi. Sektor swasta ditempatkan sebagai mesin pertumbuhan BIMP-EAGA dan sektor publik diharapkan dapat menjadi fasilitator dari pertumbuhan tersebut. Fungsi Pemerintah diharapkan dapat menciptakan lingkungan kondusif bagi kerjasama ekonomi dan mendukung sektor swasta dengan menyediakan sebuah kerangka kerja yang fasilitatif, diciptakan dengan koordinasi dan harmonisasi kebijakan publik yang kondusif dan iklim investasi yang serupa. Kedua, untuk secara langsung mendorong realisasi dari perdagangan lintas batas dan kesempatan investasi melalui kebijakan, program dan proyek khusus yang disediakan untuk meningkatkan investasi dalam sektor produktif seperti pertanian, perikanan, kehutanan, turisme dan pembangunan industri. Strategi pembangunan ekonomi di sub kawasan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan sektor swasta dalam

⁸⁴ BIMPEAGA Business Council (BEBC) in Collaboration with German Technical Cooperation, *Handbook and Directory 2008*, (BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East Asean Growth Area), 2008), hal. 8-10.

merealisasikan kesempatan investasi yang luas dalam kerangka EAGA. BIMP-EAGA telah diperkuat dengan struktur organisasi dan institusional. BIMP-EAGA *Summit* sebagai forum tertinggi diadakan setiap tahun. SOMM (*Senior Officials Meeting and Ministers Meeting*) adalah mekanisme utama dari seluruh negara anggota yang memberikan arahan strategis dan dasar-dasar kebijakan umum.

Hingga 2008 telah diselenggarakan 17 kali SOM dan 12 kali pertemuan tingkat Menteri. Sementara itu, BIMP-EAGA *Business Council* (BEBC) adalah wadah resmi sektor swasta dalam EAGA. BEBC didudukkan secara setara dengan empat negara anggota sebagai pengakuan akan pentingnya peran sektor swasta dalam EAGA. BIMP-EAGA telah merumuskan *Roadmap to Development and Action Plan* untuk membawa pembangunan BIMP-EAGA dari tahun 2006 ke 2010. Dalam konteks investasi, tujuannya adalah meningkatkan investasi di sub kawasan EAGA menjadi 10% di tahun 2010. Dalam pertemuan KTT ke empat pemimpin EAGA ditahun 2002 telah ditetapkan dua koridor pembangunan prioritas dalam EAGA yaitu; *West Borneo Economic Corridor* dan *The Greater Sulu Sulawesi Economic Corridor* (GSSC). ADB telah menyediakan bantuan teknik pada BIMP-EAGA untuk studi investasi di dua koridor tersebut.

2.2.4 Greater Mekong Sub-regional (GMS)

Melihat sejarahnya, Kerangka Kerjasama Sub-Regional Mekong atau *Greater Mekong Sub-region* (GMS) telah dibentuk jauh sebelum pembentukan ASEAN. Komite Mekong sebagai embrionya telah dibentuk di awal tahun 1957 dengan bantuan dari badan PBB, ESCAP. Karena itu sesungguhnya, kerangka kerjasama ini adalah perintis kerjasama regional di Asia Tenggara. Di awalnya, Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggotanya. Forum GMS sendiri didirikan pada tahun 1992, sebelum Viet Nam, Laos, Myanmar dan Kamboja menjadi anggota ASEAN. Kini, setengah anggota ASEAN bergabung di GMS. ASEAN dan GMS sebagaimana dijelaskan oleh Sekjen ASEAN Rodolfo C. Severino, Jr dirasa dapat berbagi kesamaan tujuan. Keduanya mencari kerjasama pembangunan sebagai tujuan mendasar, mendorong iklim yang baik dan menyusun kondisi yang diperlukan bagi investasi dan lain-lain kegiatan ekonomi. Banyak proyek infrastruktur GMS adalah bagian dari program ASEAN yang luas.

Banyak aktivitas ASEAN dan GMS bersifat tumpang tindih. ASEAN banyak merundingkan secara langsung aktivitasnya sendiri, khususnya dalam pembangunan SDM untuk empat anggota terbaru, semua yang juga terjadi dalam kerangka GMS. ASEAN pada faktanya menggunakan GMS sebagai kerangka kerja untuk mengintegrasikan empat negara anggota terbaru menjadi lebih dekat secara lebih cepat dengan seluruh ASEAN. Pada saat yang sama, banyak program ASEAN khususnya pada infrastruktur, SDM dan lingkungan yang dapat dimplementasikan dengan fokus yang lebih besar dan dengan ritme yang lebih cepat karena dibawa pada area dan konteks GMS yang lebih kecil. Program-program ASEAN ini dapat mencapai kemajuan lebih cepat dengan konteks GMS. Meskipun GMS melibatkan China, kerangka ASEAN secara kuat ada didalam GMS. Investor dari negara-negara anggota ASEAN diberi akses pada dan memperoleh perlakuan nasional dari anggota ASEAN yang lain. Kemudian, investor dari Singapura, Malaysia dan Thailand apakah secara sendiri-sendiri maupun sebagai joint venture dapat berinvestasi di GMS. Selain itu, negara-negara GMS, sebagai anggota ASEAN adalah pihak yang terikat dengan kesepakatan ASEAN, seperti CEPT, AFTA, AIA, dan AFAS. ASEAN juga memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diaplikasikan pada seluruh kesepakatan ekonomi ASEAN. Ini berarti bahwa negara-negara anggota GMS telah terintegrasi secara penuh dalam peraturan dasar ASEAN mengenai sistem perdagangan dan investasi.

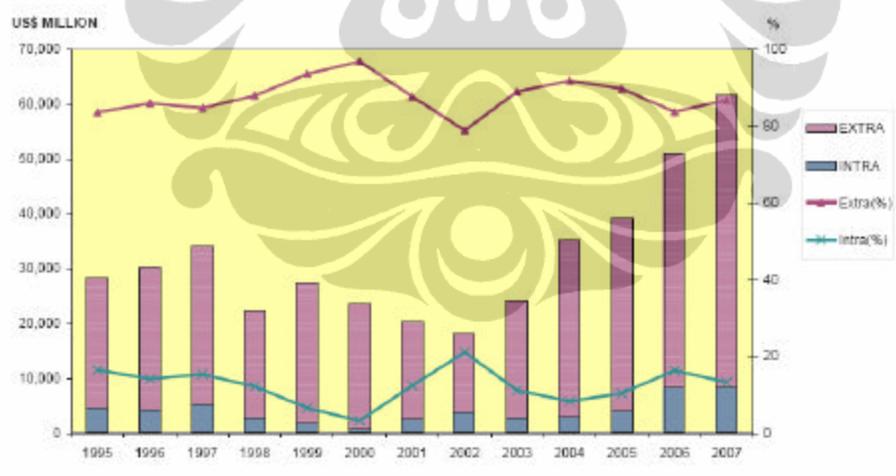
ASEAN juga berusaha mengikat para pihak luar GMS dengan beberapa cara. Antara lain, dibentuknya *ASEAN-Mekong Basin Development Cooperation Forum*, yang mengikat seluruh negara ASEAN dengan China ditingkat menteri; *AEM-MITI Economic and Cooperation Committee*, sebuah badan dari ASEAN dan Kementerian Perdagangan dan Industri Jepang yang awalnya berfokus pada pembangunan GMS. Forum antara ASEAN, China, Jepang dan Korea, yang mencakup beberapa tingkatan, termasuk KTT, yang mengambil perhatian khusus pada GMS.

2.3. Posisi Terkini Investasi Intra-ASEAN: Setelah Berbagai Upaya

Berbagai upaya diatas, masih belum berhasil meningkatkan proporsi investasi intra-ASEAN⁸⁵. Aliran FDI intra-ASEAN belum meningkat. Bahkan tren investasi intra-ASEAN, sebagaimana terlihat di Tabel II.1 terlihat jelas bersifat fluktuatif. Pernah mencapai tingkat terendah dalam prosentase di tahun 2000. Selama 2001-2005 rata-rata pangsa FDI intra-ASEAN hanya mencapai 11,3%. ASEAN praktis masih bergantung pada aliran FDI global, terutama yang berasal dari Uni Eropa, AS dan Jepang. Sementara negara Asia lainnya yang menjadi sumber FDI yang cukup besar bagi ASEAN adalah Hong Kong, Taiwan, Korea dan China.

Empat negara besar yang menikmati aliran masuk FDI di ASEAN adalah Singapura, Thailand, Malaysia dan Indonesia. Tingginya aliran FDI ke ASEAN disinyalir terkait dengan kegiatan TNC disektor manufaktur, jasa keuangan dan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan pasar global.

Tabel 2.1
Perbandingan Arus FDI Ekstra dan Intra ASEAN
1995-2007



Sumber: Sekretariat ASEAN-ASEAN FDI Database, 2008.

Sementara itu Tabel 2.2 berikut ini menunjukkan posisi negara-negara ASEAN yang memang lebih cenderung berstatus sebagai penerima FDI. Praktis hanya Malaysia yang memiliki perbandingan FDI *inward* dan *outward* yang

⁸⁵ Rahmat Dwi Saputra, *op.cit.*, hal. 186 - 204.

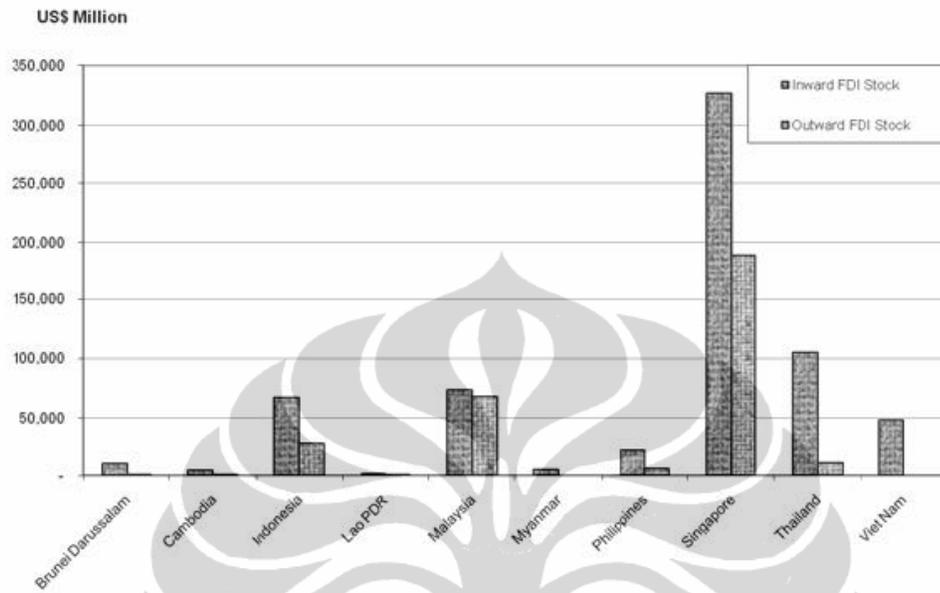
hampir sama; sementara stok OFDI Singapura dan Indonesia berada pada posisi sekitar 50% dari stok FDI *inward* di negara masing-masing.

Sementara itu gambaran umum mengenai aktivitas investasi intra-ASEAN akan ditunjukkan oleh dua tabel berikutnya. Tabel 2.3 memperlihatkan akumulasi arus FDI intra-kawasan dari kategori negara *host* dan sumber antara tahun 1995 dan 2007. Sementara Tabel 2.4 memperlihatkan negara sumber dan *host* utama dari FDI intra-kawasan.

Nampak bahwa Singapura memainkan peran yang dominan sebagai negara sumber utama bagi investasi intra-kawasan. Dari tahun 1995 sampai 2007 investasi dari Singapura sendiri tercatat sebanyak 65% dari total akumulasi investasi intra-ASEAN. Diikuti dari kejauhan oleh Malaysia (dengan 17,7%) dan Indonesia (9%) serta Thailand di urutan keempat dengan (4,9%). Investasi Singapura menyebar di kawasan tapi lebih terkonsentrasi di negara-negara ASEAN yang ekonominya lebih maju seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia. Singapura juga adalah investor intra-kawasan yang terbesar bagi kelompok negara-negara ASEAN yang tertinggal seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (CLMV). Bagi Brunei dan CLMV, proporsi aliran PMA yang berasal dari ASEAN lebih besar dibandingkan ASEAN secara keseluruhan, yaitu sekitar 18 persen.

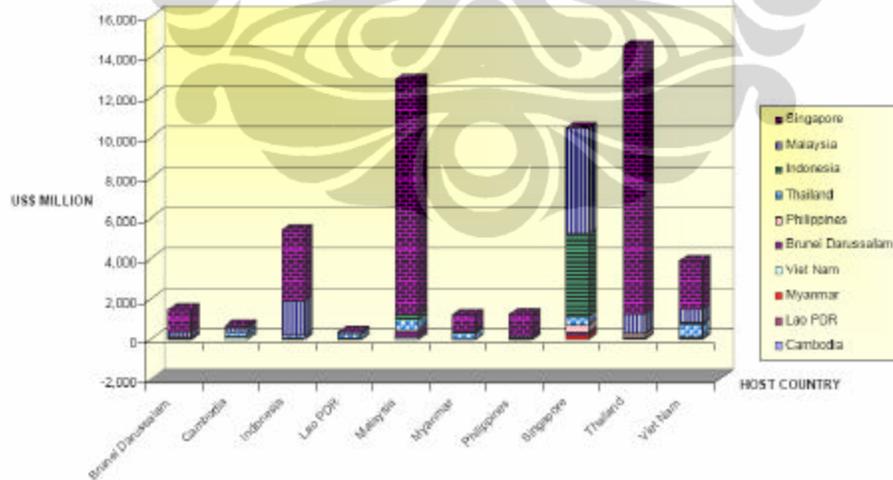
Perlu digaris bawahi bahwa arus OFDI dari Malaysia dan Indonesia dalam jumlah amat besar juga terkonsentrasi di Singapura. Sebanyak 57% dari OFDI intra-kawasan dari Malaysia pergi ke Singapura, sementara sejumlah 18% ke Indonesia, sebanyak 9,7% ke Thailand, 7,5% ke Vietnam, 3% ke Brunei dan ke Kamboja 2%. Indonesia amat menyukai Singapura karena 85% dari OFDI-nya ada di sana, sementara yang ada di Malaysia hanya 6%. Sementara untuk Thailand, polanya lebih menyebar, yaitu 26% di Vietnam, 19% di Malaysia, 13,6% di Singapura, 13% di Myanmar dan negara-negara ASEAN lainnya.

Tabel 2.2
Perbandingan Stok FDI *Inward* dan *Outward*
Negara-Negara ASEAN Tahun 2008



Sumber: UNCTAD 2008

Tabel: II.3
Akumulasi FDI Intra-ASEAN Negara Sumber 1999-2007



Sumber: ASEAN Secretariat-ASEAN FDI Database 2008

Tabel 2.4
Negara-Negara Sumber dan Penerima Investasi Intra-ASEAN
(Tahun 2007, dalam jutaan dollar AS)

Negara Sumber	Nilai	%	Negara Penerima	Nilai	%
Brunei Darussalam	440,90	0,85	Brunei Darussalam	1.490,99	2,87
Kamboja	24,90	0,05	Kamboja	653,48	1,26
Indonesia	4.678,36	9,0	Indonesia	5.365,70	10,33
Laos	57,93	0,11	Lao	381,23	0,73
Malaysia	9.192,37	17,69	Malaysia	12.839,19	24,71
Myanmar	170,44	0,33	Myanmar	1.193,54	2,30
Filipina	752,65	1,45	Filipina	1.250,34	2,41
Singapura	33.839,74	65,12	Singapura	10.444,71	20,10
Thailand	2.547,49	4,90	Thailand	14.510,63	27,37
Vietnam	256,66	0,49	Vietnam	3.831,62	7,37
Total	51.961,44	100	Total	51.961,44	100

Sumber: Sekretariat ASEAN-ASEAN FDI Database, 2008.

Sebanyak 80% investasi intra-kawasan terkonsentrasi di Singapura, Malaysia, Indonesia dan Thailand. Thailand adalah tujuan investasi intra-ASEAN yang paling favorit. Ada 27,9% investasi intra-regional ASEAN yang pergi ke Thailand, diikuti Malaysia (24,7%), Singapura (20,1%) dan Indonesia (10,3%) Diantara negara-negara baru anggota ASEAN, Vietnam adalah penerima FDI intra-ASEAN yang terbesar (7,3%), diikuti Myanmar (2,3%), Kamboja (1,3%) dan Laos (0,7%).

Dapat disimpulkan bahwa distribusi geografis dari investasi intra-ASEAN menunjukkan dua hal untuk dapat digarisbawahi. Pertama, peran utama Singapura sebagai pusat investasi regional tidaklah dapat dibantah, karena Singapura bukan hanya merupakan negara sumber FDI yang berinvestasi di seluruh negara-negara ASEAN lainnya, tetapi juga merupakan tujuan utama dari OFDI negara-negara ASEAN lainnya. Peran sentralnya juga dapat digarisbawahi dengan mempertimbangkan bahwa OFDI Malaysia dan Indonesia terkonsentrasi di Singapura. Hiratsuka (2006) menjuluki karakteristik dari peran Singapura tersebut sebagai pusat perdagangan, riset dan pengembangan yang utama di kawasan. Kedua, terdapat dua lapis (pola) investasi intra-ASEAN, yaitu investasi dua arah antara negara-negara yang lebih besar dan lebih maju dalam ASEAN-5 (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand). Dari kelima negara itu, ada pola yang lebih khusus antara Singapura, Malaysia dan Indonesia. Arus investasi dua arah yang amat maju ini diantara ketiga negara tersebut sebagiannya dihasilkan dari sub-kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura

(IMS). Lapis kedua dari investasi intra-ASEAN adalah lebih bersifat satu arah dengan negara-negara yang lebih maju berinvestasi di negara-negara yang tertinggal, contohnya kegiatan investasi Singapura, Malaysia dan Thailand di Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (CLMV). Gejala ini menunjukkan pentingnya kerjasama sub-regional di dalam ASEAN untuk mendorong investasi. Dua kerangka kerjasama sub-regional yang maju adalah IMS dan *Greater Mekong Sub-region* (GMS). GMS merekatkan Thailand dengan Myanmar, Cina, Kamboja, Laos dan Vietnam. Peran Thailand menonjol di wilayah GMS.

Dari tabel diatas, juga nampak bahwa penyebaran investasi intra ASEAN hingga tahun 2007 menunjukkan bahwa diantara negara-negara ASEAN-5, Filipina adalah negara yang paling lemah untuk bertindak sebagai sumber FDI intra-ASEAN. Sementara Thailand adalah penerima paling banyak investasi-intra ASEAN.

Sementara itu studi Pananond⁸⁶ menunjukkan bahwa ASEAN mulai menjadi saling bergantung satu sama lain sebagai tujuan investasi. Singapura, Malaysia dan Thailand secara aktif telah berinvestasi di kawasan ASEAN. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tujuan geografis dari OFDI dari Singapura (Lihat Tabel 2.8), Thailand (Lihat Tabel 2.14) dan Malaysia (Lihat Tabel 2.10), yang proporsi terbesarnya ditempatkan di negara-negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2006, 23% dari total OFDI Singapura ditujukan untuk negara-negara ASEAN lainnya, sementara rasio untuk Thailand mencapai 45% dan Malaysia 34%.

Patut dicatat juga bahwa nilai yang signifikan dari ASEAN sebagai tujuan intra-regional telah ditantang oleh Cina. Singapura dan Malaysia, dua sumber OFDI terbesar dikawasan, juga telah meningkatkan tujuan investasi ke Cina selama beberapa dekade ini (lihat Tabel 2.8 dan Tabel 2.10). Walaupun porsi Cina pada OFDI Singapura tidak melebihi dari yang ditempatkan di wilayah ASEAN, China telah menjadi negara penerima OFDI Singapura terbesar sejak tahun 1997. Di penghujung 2006, total stok investasi Singapura di China telah berjumlah 30,7 miliar dollar Singapura-hampir 60 % total stok OFDI Singapura di semua negara-negara ASEAN. Malaysia juga amat tertarik untuk berinvestasi di

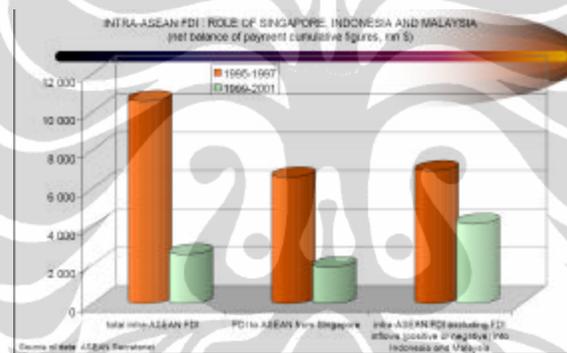
⁸⁶ Pavidia Pananond, *op.cit.*, [http://www.itd.or.th/system/files?file=091208%20\(6\).pdf](http://www.itd.or.th/system/files?file=091208%20(6).pdf) diakses tanggal 5 Januari 2010.

Cina, dibuktikan dengan jumlah peningkatan stok OFDI Malaysia di Cina meningkat lebih dari 30 kali lipat antara tahun 2000-2006.

Terpusatnya aliran masuk FDI intra-ASEAN pada empat negara, yaitu Singapura, Indonesia, Malaysia dan Thailand nampaknya sejalan dengan *intra industri trade* pada produk elektronik serta teknologi informasi dan komunikasi.

Penelitian dari kalangan pebisnis, Thierry Apoteker⁸⁷, menyebutkan bahwa dalam membiarkan investasi intra ASEAN, nampak ada keterkaitan yang menarik antara tiga negara yaitu Singapura, Malaysia dan Indonesia. Apoteker mengutip data dari Sekretariat ASEAN, yang penulis sajikan dalam Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Peranan Singapura, Indonesia dan Malaysia dalam Intra-ASEAN FDI



Sementara itu, Tabel 2.6 dibawah ini menunjukkan tujuh peringkat teratas arus FDI bilateral antara negara-negara ASEAN pada periode 1997-2005. Nampak bahwa hubungan antara tiga negara Singapura, Indonesia dan Malaysia menang sangat kuat.

Dalam hal FDI intra ASEAN, Singapura memiliki peranan tersebar sebagai negara asal sumber FDI. Hal ini menunjukkan kesiapan prasarana dan sarana pendukung negara tersebut yang cukup dalam menarik FDI. Dengan demikian menarik untuk dilihat bagaimana iklim investasi di ASEAN sebagai faktor penarik utama FDI.

⁸⁷ Thierry Apoteker, *Judul*, (Makalah oleh Managing Director TAC Consultant to Asia-Invest Forum, dipresentasikan dalam Asia-Invest Forum, Ho Chi Minh City, 30 Oktober 2003), hal.5.

Tabel 2.6
**Tujuh Peringkat Teratas Arus FDI Bilateral Antara Negara-Negara ASEAN
 1997-2005 (dalam jutaan dollar AS)**

Source	Host	Average		In percent to Total Intra-ASEAN FDI Inflow	
		(1997-00)	(2001-05)	(1997-00)	(2001-05)
Singapore	Malaysia	844.1	1,273.3	51.2	46.5
Singapore	Thailand	441.7	1,381.9	26.8	50.4
Singapore	Philippines	88.9	95.0	5.4	3.5
Indonesia	Singapore	104.5	16.1	6.3	0.6
Philippines	Thailand	4.9	48.4	0.3	1.8
Indonesia	Malaysia	26.0	15.8	1.6	0.6
Malaysia	Thailand	19.4	21.2	1.2	0.8

Sumber: UNCTAD FDI Database

Sementara itu Tabel 2.7 menunjukkan bahwa lima sektor yang paling penting dalam investasi intra-ASEAN adalah manufaktur (32,3 %), jasa finansial (23,3 %), real estate (16,1 %), lain-lain servis (11,5 %) pertambangan dan penambangan (8,8 %). Singapura sekali lagi adalah pemain dominan di seluruh sektor kecuali real estate dimana Indonesia dan Malaysia bertindak sebagai dua investor terbesar. Singapura merajai sektor manufaktur serta finansial dan jasa asuransi. Investasi dari Singapura sendiri terhitung lebih dari 80 % dari total investasi intra-kawasan di dalam sektor-sektor tersebut. Sementara itu OFDI Malaysia banyak memasuki real estate, sektor mediasi dan jasa finansial (termasuk jasa asuransi), manufaktur dan jasa-jasa lainnya yang meliputi 95 % dari investasi Malaysia di kawasan ASEAN. Di sektor manufaktur OFDI Malaysia terkonsentrasi pada tiga jenis industri, yaitu industri logam, permesinan dan perlengkapan, dan makanan dan minuman. Sementara Indonesia menunjukkan minat yang sangat besar pada sektor real estate yang terhitung menyerap 78 % dari OFDI-nya di dalam kawasan ASEAN. Untuk Thailand, investasi intra regionalnya didominasi oleh sektor pertambangan dan penambangan yang diikuti dengan sektor jasa-jasa dan manufaktur. Di sektor manufaktur Thailand mengkonsentrasikan OFDI-nya pada jenis peralatan elektronik, makanan dan minuman.

Signifikansi dari industri makanan dan minuman sebagai kunci dari kesuksesan investasi intra ASEAN terlihat cukup jelas karena merupakan sektor

yang paling aktif selain peralatan telekomunikasi. Namun jika peralatan telekomunikasi menarik 23,1% investor dari luar kawasan, sektor makanan dan minuman hanya menyerap 3,7 % investasi dari luar kawasan.

Mayoritas dari investasi intra ASEAN, nampaknya bermotif mencari pasar karena industri tipe ini tidak melibatkan jaringan produksi yang rumit. Memang ada tipe-tipe lain dari pergerakan FDI tetapi jumlahnya relatif sangat sedikit. Laporan UNCTAD⁸⁸ juga menggarisbawahi bahwa OFDI bermotif mencari pasar adalah tipe umum dari strategi multinasional negara berkembang khususnya pada investasi di negara tetangga selama masa awal dari proses internasionalisasi. Bila kita hubungkan dengan tiga sektor kunci yang tercatat sebagai sektor utama dari investasi intra regional yaitu makanan dan minuman, jasa keuangan dan asuransi dan real estate, ketiga sektor ini memasuki pasar negara tetangga untuk meningkatkan jangkauan pasar. Pananond⁸⁹ juga menegaskan bahwa motif OFDI yang mencari pasar adalah strategi dari multinasional Thailand selama dan sesudah krisis ekonomi 1997. Tipe investasi yang mencari efisiensi lebih terlihat di antara negara-negara Asia Timur dengan jaringan produksi yang lebih kompleks. Investasi tipe ini lebih banyak dilakukan oleh perusahaan dari luar kawasan dibandingkan dari dalam kawasan. Ada juga tren yang sedang tumbuh yaitu tipe OFDI yang mencari sumber daya pada sektor primer seperti pertambangan dan penambangan serta minyak dan gas yang sangat aktif dilakukan oleh Petronas Malaysia dan PTT Thailand yang merupakan dua investor utama di sektor energi Myanmar.

Pendapat berbeda diajukan oleh Daisuke Hiratsuka. Menurut Daisuke Hiratsuka⁹⁰, multinasional negara-negara ASEAN melakukan ekspansi bisnis keluar negeri dengan motif mencari efisiensi, seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan negara maju. Banyak perusahaan Singapura yang pergi ke Malaysia ketika upah tenaga kerja murah dan pebisnisnya dapat beraktivitas secara komuter antara dua negara tersebut. Multinasional Singapura dan Malaysia

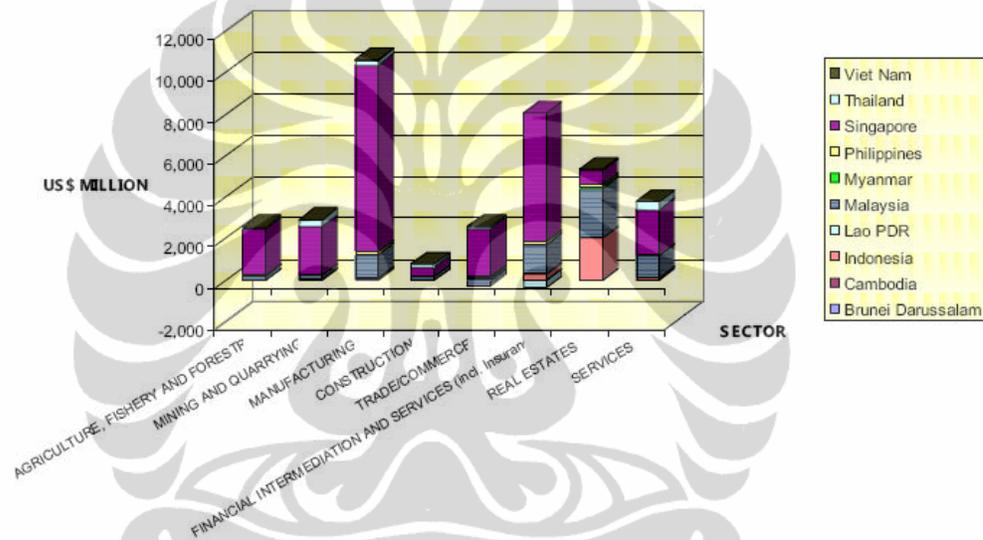
⁸⁸ *World Investment Report 2006*, (New York and Geneva: UNCTAD, 2006), hal. 158 - 163.

⁸⁹ Pavida Panannond, *op.cit.*, [http://www.itd.or.th/system/files?file=091208%20\(6\).pdf](http://www.itd.or.th/system/files?file=091208%20(6).pdf), diakses tanggal 5 Januari 2010.

⁹⁰ Daisuke Hiratsuka, *Outward FDI From Asean and Itraregional FDI in Asean: Trends and Drivers*, (Thailand: Makalah pada Asean-UNCTAD Annual Seminar on Key Issues of FDI: Outward FDI from Asia, Chiang Mai, 10 April 2006), hal. 6.

telah banyak memasuki Thailand, Indonesia dan China. Pada sisi lain, multinasional Thailand memasuki Laos karena upah tenaga kerja murah dan kesamaan bahasa serta budaya diantara mereka. Jelaslah bahwa upah tenaga kerja yang lebih murah dan kedekatan geografis adalah pendorong terjadinya FDI intra-ASEAN. Hal ini terlihat dari sektor-sektor yang berkembang dalam konteks investasi intra-ASEAN.

Tabel 2.7
Akumulasi Arus FDI Intra-ASEAN berdasarkan Sektor Industri dan Negara Sumber
1999-2007



Sumber: Sekretariat ASEAN-ASEAN FDI Database, 2008.

Disisi lainnya, kehadiran MNC adalah motor bagi integrasi ekonomi kawasan. Dalam konteks itu, telah terdapat 18 perusahaan ASEAN di dalam daftar 100 multinasional terbesar dari negara-negara berkembang sebagaimana dirilis dalam laporan UNCTAD 2008. Dimana 11 diantaranya berasal dari Singapura, 6 dari Malaysia dan satu dari Filipina. Data ini sekali lagi menegaskan pentingnya Singapura dan Malaysia sebagai investor utama di kawasan. Juga perlu diperhatikan aspek kepemilikan negara di antara multinasional ASEAN. Diantara 11 multinasional utama Singapura, 6 diantaranya dimiliki oleh pemerintah Singapura melalui perusahaan holding Temasek. Dari segi pelaku bisnis, peran negara cukup besar untuk membangun ikatan ekonomi ASEAN.

2.4. Kebijakan dan Praktek FDI Negara-Negara ASEAN-5

Bagian ini menguraikan sikap, cara pandang dan perilaku setiap negara ASEAN-5 terhadap isu FDI pada umumnya dan OFDI pada khususnya. Secara umum, ASEAN masih dikenal sebagai kawasan yang utamanya adalah penerima FDI. ASEAN amat tergantung pada FDI *inflows* dari non anggota yaitu sebesar 82%. Namun demikian, dilihat dari segi isu, *outward investment* bukanlah isu yang asing atau baru bagi kawasan. UNCTAD telah mencatat OFDI dari negara-negara ASEAN-5 sejak tahun 1980, telah mencapai angka yang cukup signifikan⁹¹. Keragaman struktur ekonomi dikawasan ASEAN membuatnya secara khusus menjadi faktor utama bagi terciptanya kerjasama investasi⁹².

2.4.1. Singapura

Dalam kebijakan FDI Singapura tidak menganut pembatasan untuk arus FDI masuk, kecuali terkait dengan keamanan nasional, kesehatan dan berimplikasi sosial, antara lain: airlines, angkutan laut, jasa utilitas publik seperti listrik, gas dan air, telekomunikasi, penerbit surat kabar, persenajataan dan amunisi. Sementara kebijakan *outward* FDI-nya dinyatakan bebas. Bahkan Pemerintah Singapura telah mengimplementasikan serangkaian tindakan untuk memfasilitasi ekspansi internasional dari perusahaan publik dan privat Singapura⁹³.

Di kawasan ASEAN, Singapura nampak memanfaatkan keahliannya dibidang jasa layanan udara, perbankan, telekomunikasi dan perdagangan. Investasi perusahaan Singapura di Diosdado Macapagal International Airport (DMIA) Filipina, akuisisi Bank Buana dan BII di Indonesia, akuisisi Shin Corp, perusahaan telekomunikasi terbesar Thailand, dan akuisisi Telkomsel Indonesia menunjukkan hal tersebut.

Peningkatan peran Singapura dalam integrasi kawasan, melalui aksi korporasinya didorong oleh kebijakan liberalisasi di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand serta kawasan Indochina: Kamboja, Laos dan Vietnam. Singapura adalah partner dagang utama dan investor di negara-negara tersebut. Integrasi

⁹¹ *Ibid.*, hal. 6.

⁹² Michael G. Plummer dan David Cheong *op.cit.*, http://people.brandeis.edu/~cbown/conferences/mcculloch/Plummer_Cheong.pdf, diakses tanggal 5 Februari 2009.

⁹³ UNCTAD Investment Brief No.4/2006. *Developing Countries are Beginning to Promote Outward FDI*, www.unctad.org/wir, diakses pada tanggal 8 September 2009.

perdagangan dan investasi meningkat berkat kerjasama investasi dalam Segitiga pertumbuhan ASEAN yang melibatkan Indonesia, Malaysia dan Singapura, dengan kerjasama perdagangan dan investasi dibawah skema AFTA⁹⁴.

Dalam penelitian Gaute Ellingsen, Winfried Likumahuwa dan Peter Nunnenkamp, yang diterbitkan tahun 2006⁹⁵, disimpulkan dua hal. Pertama, bahwa Singapura merupakan salah satu investor penting bagi kawasan. Kedua, OFDI Singapura berfokus pada negara-negara dengan penghasilan rendah. OFDI Singapura meningkat pesat hingga sembilan kali lipat pada periode 1992-2003. Perkembangan ini terjadi akibat dorongan Pemerintah pada OFDI. Pemerintah Singapura secara gamblang mulai memberi perhatian kepada OFDI setelah resesi yang terjadi pada tahun 1980-an. *International Direct Investment Program* disetujui pada tahun 1988. Para investor ditawarkan intensif pajak dan dukungan finansial. Komite yang bertujuan untuk memfasilitasi modal, *Promote Enterprise Overseas* dibentuk pada tahun 1993. Pemerintah Singapura menganggap OFDI sebagai hal yang esensial untuk mempertahankan iklim kompetitif internasional melalui perubahan struktural dan peningkatan industri. Hal ini berarti, aktivitas industri yang *lower-end* diharapkan dapat berpindah ke lokasi dengan upah buruh/pekerja dan tanah yang lebih rendah, sementara SDM dan teknologi yang tinggi tetap ditahan di Singapura. Untuk itu, FDI vertikal (untuk efisiensi), dapat diharapkan untuk membentuk sedikitnya bagian dari OFDI⁹⁶. Negara-negara di Asia dengan pendapatan yang rendah, terutama Cina, India dan negara-negara Asia Tenggara, telah menjadi target dari investor Singapura. Sebagai contoh, dalam hal strategi regional, investor-investor Singapura diberikan fasilitas istimewa dan Pemerintahnya terjun langsung dalam hal menyiapkan proyek industri dan infrastruktur di Cina, India, Indonesia dan Vietnam. Dalam waktu yang bersamaan, pemerintah Singapura mendorong FDI di negara-negara industri maju untuk memfasilitasi akuisisi dari teknologi terbaru. Perusahaan yang

⁹⁴ Chia Siouw Yue, *op.cit.*, www.cpu.gov.hk/english/documents/conference/e-sychia.rtf diakses tanggal 2 Februari 2010.

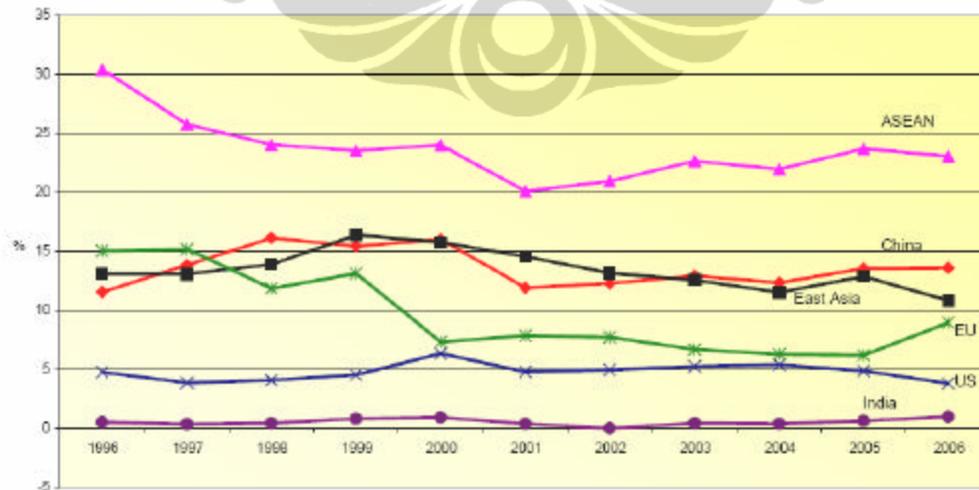
⁹⁵ *Transnational Corporations*, Vol. 15, No. 2, Agustus 2006, http://www.unctad.org/en/docs/iteit2006292_en.pdf, diakses pada tanggal 8 September 2009.

⁹⁶ Kontras dengan yang dinamakan FDI horizontal (pencarian pasar) yang dimotivasi oleh pertimbangan kepada akses pasar lokal. Tetapi, perbedaan analisa antara FDI vertikal dan horizontal seringkali tidak jelas. Sebagai contoh, adalah yang dilakukan Cina dimana FDI hadir karena adanya pertimbangan biaya dan pasar.

menjadi rekanan pemerintah Singapura biasanya digunakan sebagai penghubung dari proses ini. Pada tahun 2003, industri finansial mencakup lebih dari setengah stok OFDI Singapura. Sektor jasa-jasa lainnya berkontribusi sebesar 17 %. Fokus OFDI Singapura di Asia lebih ke sektor manufaktur. Pada tahun 2003 lebih dari 90% FDI Singapura di sektor manufaktur, dialokasikan di Asia⁹⁷

Berbeda dengan pola di Eropa, fokus dari FDI Singapura di Asia tidak dapat dikaitkan dengan proses institusionalisasi integrasi regional. Negara-negara anggota ASEAN hanya menerima seperlima dari total stok FDI Singapura atau kurang dari setengah dari keseluruhan stok yang ada di negara-negara Asia. Sejak tahun 1992, OFDI Singapura di sektor manufaktur dialihkan dari negara-negara ASEAN ke negara Asia lainnya. Hal ini dikarenakan penurunan kepentingan dari Malaysia. Walaupun Malaysia tetap menjadi negara penerima terbesar kedua (setelah Cina) FDI dari Singapura. Pembagian saham FDI dengan Malaysia di sektor manufaktur menurun dari 51 % tahun 1992 menjadi 16 % tahun 2003. Pada tahun tersebut, untuk sektor manufaktur, negara-negara ASEAN menerima 38 % OFDI Singapura, sedangkan untuk negara-negara Asia lainnya sebesar 53%. Dalam hal akumulasi aliran FDI pada tahun 1995-2001, Singapura ada peringkat 2 diantara semua negara sumber di Malaysia dan Myanmar, dan peringkat ketiga di Brunei Darussalam, Filipina dan Vietnam.

Tabel 2.8
Sebaran OFDI Singapura Menurut Lokasi 1996-2006



Sumber: Singapore Department of Statistics (2006)

⁹⁷ Singapore Department of Statistic, var.iss., 2003

2.4.2. Malaysia

Kebijakan Malaysia untuk *inward* FDI adalah membebaskan kepemilikan asing untuk sektor manufaktur. Namun, bila melalui akuisisi, merger atau pengambilalihan harus memperoleh persetujuan Komite Investasi Asing. Izin diberikan dengan mempertimbangkan kapasitas, bahan baku, keamanan, kesehatan dan keamanan nasional.

Sementara kebijakan OFDI Malaysia adalah bebas investasi dengan dana sendiri. Sementara investasi yang dibiayai perbankan domestik dibatasi pertahun maksimal RM 10 juta untuk perusahaan grup dan RM 100.000 untuk individu. Multinasional Malaysia juga aktif berkorporasi di kawasan. Di Indonesia, Guthrie menguasai banyak kebun sawit produktif. Selain itu, Khazanah, BUMN Malaysia, membeli Bank Niaga dan Lippo. Giant Hipermarket dan Petronas juga sudah eksis dalam beberapa tahun belakangan ini. Pebisnis Malaysia juga banyak memanfaatkan peluang bisnis di Thailand. Dalam lima tahun terakhir, 160 perusahaan Malaysia termasuk Petronas, Aapico, Sime Darby, Bina Puri, RHB Bank dan CIMB⁹⁸, menanam modal sekitar 1,6 miliar dollar AS dibidang kelistrikan, elektronik, logam dan sektor permesinan.

Dalam penelitian Dr. Mohammed Ariff dan Gregore Pio Lopez⁹⁹, ditemukan beberapa aspek fundamental dari aktivitas OFDI Malaysia. Perusahaan-perusahaan Malaysia sudah melakukan investasi di luar negeri sejak pertengahan 1970-an. Namun OFDI Malaysia baru menjadi sesuatu yang signifikan di awal 1990-an seiring dengan perubahan tatanan politik dan ekonomi global karena berakhirnya perang dingin. Tercapainya kesepakatan GATT/WTO Uruguay Round yang prosesnya telah berjalan sejak 1986 dan selesai pada tahun 1994, pendirian AFTA ditahun 1992 dan proses liberalisasi ekonomi yang dimulai pertengahan tahun 1980-an ditingkat domestik adalah hal-hal yang mendorong peningkatan kegiatan OFDI Malaysia. Pada periode tahun 1990-2005, proporsi OFDI Malaysia naik secara dramatis terhadap PDB. Sepanjang periode sebelumnya, proporsi OFDI terhadap PDB hanya berkisar 6%. Dukungan

⁹⁸ <http://www.bernama.com/bernama/v5/newsindex.php?id=329645>, diakses tanggal 15 Januari 2010.

⁹⁹ Dr. Mohammed Ariff dan Gregore Pio Lopez, *op.cit.*, <http://www.icrier.org/.../Mohamed%20Ariff%20and%20Greg%20Lopez.pdf>, diakses tanggal 5 April 2009.

Pemerintah bagi OFDI berubah dramatis sejak 1991 sebagai respon terhadap kebuntuan struktural dan resesi ekonomi di tahun 1985. Dukungan bagi OFDI terus ditingkatkan setelah krisis finansial Asia dan kemudian menjadi strategi resmi Pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Di tahun 1991 tersebut, Pemerintah Malaysia meningkatkan dukungannya pada OFDI, khususnya dengan memberikan pengurangan pajak untuk pendapatan yang didapat dari kegiatan bisnis di luar negeri dan potongan pajak untuk remitansi devisa, insentif penangguhan pajak untuk pengeluaran pra-operasi, dan dana khusus. Sejak tahun 1995, semua pendapatan yang diremitansi oleh perusahaan Malaysia di luar negeri (kecuali perbankan, asuransi dan penerbangan) tidak dipungut pajak penghasilan. Pada tahun 2003 muncul insentif tambahan untuk kegiatan akuisisi perusahaan asing yang bergerak dalam teknologi tinggi. Di sisi lain, di tahun 1998 muncul ketentuan OFDI khusus di sektor pertanian sebagai respon atas terjadinya defisit di sektor pertanian. Ketentuan ini diperluas konteksnya pada tahun 2001 sehingga mencakup program menjamin keamanan pangan Malaysia kedepannya. Bersama Singapura, Malaysia membangun *Malaysia-Singapore Third Country Business Development Fund*, untuk mendorong perusahaan Malaysia dan Singapura untuk bekerjasama dan bergabung mencari peluang bisnis dan investasi di negara ketiga diluar Malaysia dan Singapura. Upaya menciptakan MNC Malaysia juga dilakukan melalui perbankan. Pada tahun 2007, fasilitas pembiayaan OFDI oleh Exim Bank dialokasikan sebesar 2 miliar RM. Sebuah proposal untuk memulai bisnis di luar negeri dapat dibiayai hingga 100 juta RM. Alasan geopolitik adalah faktor penting untuk mempromosikan OFDI Malaysia khususnya ke negara Selatan. Kebijakan luar negeri “*Prosper Thy Neighbour*” mencakup kerjasama teknik dan investasi Selatan-Selatan. Faktor utama yang mendorong OFDI Malaysia adalah sama dengan OFDI yang dilakukan negara-negara maju yaitu: biaya produksi, rantai pasokan, memperbesar akses dan pasar dan akses pada sumberdaya. Tambahan yang diminati Malaysia adalah penguatan merek, akuisisi teknologi, penambahan aset strategis dan desentralisasi operasi untuk mendiversifikasi resiko dan meningkatkan keuntungan. Stok OFDI Malaysia meningkat dari 197 juta dollar

AS ditahun 1980 (1% dari PDB) menjadi 44,5 miliar dolar AS di tahun 2005, dan menjadi 67,58 miliar dolar AS ditahun 2008.

Flow tahunan OFDI Malaysia sepanjang periode 1982-1992, rata-rata tidak melampaui 300 juta dolar AS. Pada tahun 1993 OFDI Malaysia untuk pertama kalinya melampaui angka 1 miliar dolar AS. Walaupun angka ini berfluktuasi, pada tahun 1995 tercapai rekor tertinggi yaitu 3,7 miliar dolar AS dan hanya berjumlah 2,97 miliar dolar AS di tahun 2005. Dalam statistik UNCTAD, Malaysia pernah mencatatkan dirinya sebagai negara sumber FDI terbesar kedelapan di dunia antara tahun 1993-1995.

Tabel 2.9
Outward FDI Malaysia 1990-2005

Table 1: Outward FDI of Malaysia, 1990-2005 (USD Millions)

Year	FDI Outflows	Year	FDI Outflows
2005	2,971	1997	2,626
2004	2,061	1996	3,768
2003	1,370	1995	2,488
2002	1,904	1994	2,329
2001	267	1993	1,063
2000	2,026	1992	115
1999	1,422	1991	175
1998	863	1990	129

Source: UNCTAD, various issues.

Sumber: UNCTAD

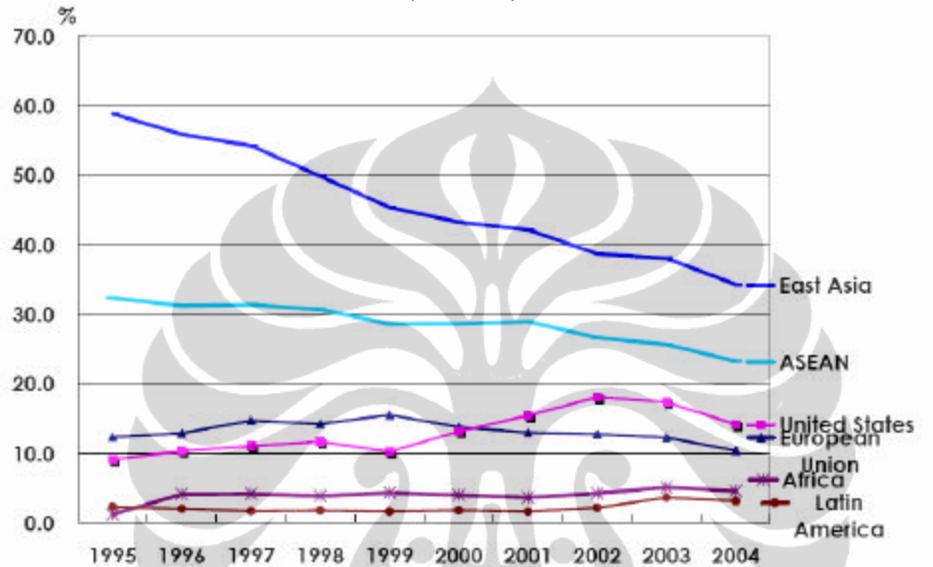
OFDI Malaysia telah menyebar ke lebih dari 100 negara. Labuan International Offshore Financial Center (LIOFC) adalah tempat paling favorit bagi OFDI Malaysia, diikuti oleh AS dan Singapura pada periode 1993-2005.

Di kawasan ASEAN, hanya Singapura dan Indonesia yang masuk peringkat sepuluh besar sebagai tempat tujuan OFDI Malaysia. Di kawasan Asia, hanya Hong Kong dan China yang masuk peringkat 10 besar tempat tujuan OFDI Malaysia.

Sementara itu, tujuan utama OFDI Malaysia pada periode 1999-2005 adalah ke negara maju. AS, Inggris, Belgia dan Belanda serta UE pada umumnya menyerap 34% OFDI Malaysia. 26% di serap (LIOFC) dan 31% diserap oleh ASEAN dan NIE's. OFDI Malaysia ke bagian lain dari Asia (termasuk China dan India) dan Afrika tak sampai mencapai 9%. Meskipun demikian, laporan UNCTAD 2005 menyebutkan bahwa Malaysia termasuk 10 besar investor di Afrika. OFDI Malaysia umumnya (92%) masuk ke bidang service, manufaktur

dan sektor migas. Bidang service yaitu keuangan, asuransi dan layanan bisnis mencakup 43%; transportasi, pergudangan dan komunikasi sebesar 20%; Utilitas dengan 20%; perdagangan, hotel dan restoran mencakup 12%.

Tabel 2.10
Sebaran Geografis OFDI Malaysia 1995-2004
(dalam %)



Sumber: UNCTAD

2.4.3. Indonesia

Kebijakan terbatu mengenai *inward* FDI Indonesia adalah mengikuti Daftar Negatif Investasi yang dikeluarkan Pemerintah. Kepemilikan asing bervariasi antara 40% -95% bergantung pada sektor usaha (Perpres 77/2007). Sementara kegiatan OFDI dinyatakan bebas. Secara resmi Indonesia tak punya regulasi yang spesifik, tetapi ada komitmen-komitmen investasi bilateral yang derajatnya sama antara negara-negara ASEAN dan non-ASEAN. Berbeda dengan Singapore dan Malaysia yang punya *policy* khusus atas kegiatan OFDI.

Indonesia nampaknya masih tergolong kebanyakan negara berkembang, yang belum mengenal kebijakan proaktif mengenai OFDI. Suatu sikap yang merefleksikan *concern* bahwa aliran modal keluar dapat mengundang *adverse economic effect*.¹⁰⁰ Sementara tak sedikit korporasi Indonesia, diam-diam telah lama menjadi pelaku aktif investasi intra-kawasan. Seperti Tong Dju dalam bisnis

¹⁰⁰ UNCTAD Investment Brief No.4/2006. *Developing Countries are Beginning to Promote Outward FDI*, www.unctad.org/wir., diakses pada tanggal 8 September 2009.

properti dan perdagangan di Singapura sejak 70-an dan CMNP di jalan tol Manila di dekade 90-an. Di era sekarang, beberapa komitmen investasi langsung yang dicatat lembaga InaGoInvest sepanjang tahun 2008 kemarin antara lain rencana akuisisi Timah (Persero) atas tambang timah lepas pantai di Myanmar dan Vietnam, Pembangunan Jaya yang mengembangkan taman hiburan di Vietnam, Kamboja dan Thailand. Sementara Agis, perusahaan perdagangan elektronik mengakuisisi Comstar, Singapura yang beromset 500 juta dollar AS pertahunnya. Dilain pihak ada rencana Bakrieland yang akan membangun proyek hotel dan resort di Singapura, Vietnam dan Kamboja. Serta Grup Rajawali yang merintis sebuah perusahaan penerbangan di Kamboja, dan Lion Air yang membangun perusahaan penerbangan berjadwal di Malaysia¹⁰¹. Dari sejarahnya, Indonesia pernah tercatat sebagai sumber FDI terkemuka di Asia. Itu terjadi di tahun 1980-an. Di tahun tersebut, Indonesia pernah masuk sebagai enam besar sumber OFDI Asia.

Secara formal, Indonesia tak memiliki kebijakan OFDI. Selama bertahun-tahun OFDI Indonesia berlangsung tanpa perhatian dari Pemerintah. Namun pada tahun 2009, sebuah organ pemerintah, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang merupakan transformasi dari Bank Ekspor Indonesia (BEI) mulai membiayai perusahaan-perusahaan nasional yang ingin berinvestasi ke luar negeri. Langkah ini antara lain dianggap sebagai bagian strategi mendorong ekspor nasional. LPEI mengambil peranan karena ekspansi bisnis keluar negeri sulit dibiayai bank komersial. Berdasarkan aturan, untuk mencegah *capital flight*, bank-bank nasional memang dilarang membiayai investasi di luar negeri, kecuali oleh cabang-babang bank nasional yang ada di mancanegara¹⁰².

Dalam penelitian Reza Y.Siregar dan Anton H.Gunawan¹⁰³ yang diterbitkan tahun 2007 didapat beberapa data fundamental mengenai kegiatan OFDI Indonesia. Pada dekade 1990-an OFDI Indonesia relatif stabil. Pada tahun 2004 terjadi lonjakan dan pada tahun 2005, stok OFDI Indonesia telah berlipat lebih

¹⁰¹ *Investasi Nasional di Luar Negeri Capai 8 Miliar Dollar AS*, (Bisnis Indonesia, 22 Juni 2008).

¹⁰² *LPEI Mulai Membiayai Investasi di Luar Negeri*, (Kompas, 18 Juni 2009), hal. 13.

¹⁰³ Reza Y.Siregar dan Anton H.Gunawan, *Outward Investment Surge in the Midst of Weak Inward Investment: perspectives from the Indonesian Experience during the post-1997 Financial Crisis*, <http://www.icrier.org/.../Reza%20Y%20Siregar520and%20Anton%20H%20Gunawan.pdf>, diakses tanggal 7 Juni 2009.

dua kali dari posisi tahun 1997. Pada tahun 2004 dan 2005, arus OFDI berkisar pada angka 1,2% PDB.

Laporan *World Investment Report* 2006 menempatkan Indonesia dalam kelompok 15 besar negara berkembang dan ekonomi transisi yang memiliki stok OFDI terbesar. Ini adalah pencapaian pertama dalam 25 tahun. Dalam kelompok tersebut, hanya ada enam negara Asia yang peringkatnya berada di atas Indonesia. Meskipun demikian OFDI dari Indonesia tergolong kecil, hanya sekitar 12% dari OFDI Singapura. Singapura adalah tujuan OFDI Indonesia yang paling utama dikawasan ASEAN. Di Singapura, OFDI Indonesia memasuki banyak sektor, mulai dari jasa keuangan dan investasi hingga perdagangan dan fasilitas transportasi.

Sejumlah proyek investasi OFDI Indonesia juga menargetkan industri padat karya di industri tekstil, garmen dan alas kaki di Kamboja, Vietnam dan China. Booming properti di India dan China juga menarik OFDI Indonesia. Pengusaha besar keturunan China di Indonesia memainkan peranan penting dari strategi OFDI Indonesia. Meski mengalami pasang surut, peranan investasi intra-ASEAN tak bisa diremehkan peranannya bagi pembangunan Indonesia.

Pada periode 1967-1974 investasi intra-ASEAN mencapai 11% dari arus FDI ke Indonesia. Saat itu, Filipina tercatat menjadi investor nomor empat terbesar di Indonesia dengan nilai 0,2 juta dolar AS. Sementara pada periode 1967-1985, investasi intra-ASEAN di Indonesia menurun, hanya mencapai 3% dari investasi asing yang masuk¹⁰⁴. Pada periode tahun 2000-an¹⁰⁵ angka tersebut kembali membaik. Singapura, dimana banyak orang Indonesia menyimpan uangnya dan melakukan kegiatan usaha, selalu tercatat sebagai salah satu pemasok investasi terbesar bagi Indonesia¹⁰⁶.

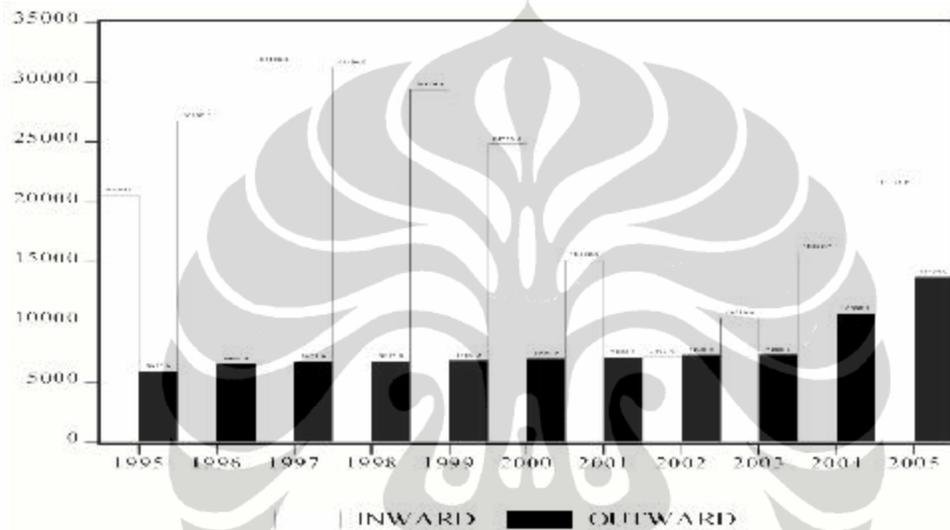
¹⁰⁴ Dewi Fortuna Anwar, *Foreign Policy and Regionalisation*, (Singapura: ISEAS-Institute of Southeast Asian Studies, 1994), hal. 292 - 293.

¹⁰⁵ http://www.lintasberita.com/Bisnis/Investasi_Asing_Terbesar_RI_Berasal_dari_Mauritius, diakses tanggal 8 Juni 2009.

¹⁰⁶ Data BKPM tahun 2005 menunjukkan Singapura merupakan investor terbesar di Indonesia dengan nilai investasi sebesar 3,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp 35,76 triliun. Nilai investasi itu naik tujuh kali lipat (dalam rupiah) dibanding investasi pada 2004.

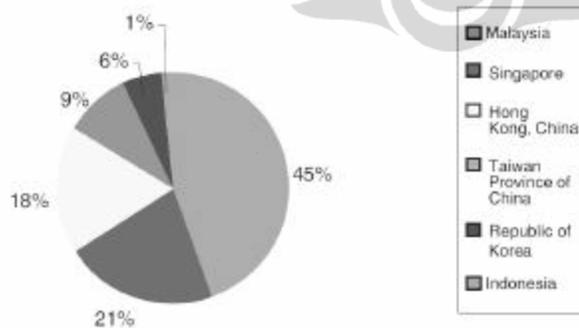
Data terbaru yang diambil dari catatan kantor statistik Republik Federal Jerman yang menyusun profil negara-negara G-20¹⁰⁷, disebutkan bahwa pada tahun 1995, stok OFDI Indonesia adalah 5,896 miliar dollar AS, meningkat menjadi 6,940 miliar dollar AS ditahun 2000, menjadi 13,932 miliar dollar AS ditahun 2005 dan 21,425 miliar dollar AS ditahun 2008.

Tabel 2.11
FDI Inward dan OFDI Indonesia 1995-2005



Sumber: The UN Database

Tabel 2.12
Enam Besar Negara Pemasok OFDI Asia Tahun 1980
(dalam %)



Sumber: UNCTAD

¹⁰⁷ www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/.../indonesia.property=file.pdf, diakses pada tanggal 9 Juni 2009.

Sementara *net flow* OFDI-nya adalah 1,319 miliar dollar AS ditahun 1995, menurun menjadi 150 juta dollar AS ditahun 2000, kembali naik di tahun 2005 menjadi 3,065 miliar dollar AS dan 4,790 miliar dollar AS ditahun 2008.

Posisi Indonesia nampaknya sebagai satu-satunya negara yang *loose* dalam isu OFDI diantara ASEAN-5, dimana negara sama sekali tidak mencampuri (mengambil jarak) dari kegiatan OFDI. Hal mana terlihat dari tidak adanya aktivitas lembaga Pemerintahan untuk memantau kegiatan OFDI, bahkan untuk sekedar pencatatan. Meskipun pada tahun 2009 mulai ada anjang-ancang untuk perubahan sikap, terutama melalui UU Investasi yang antara lain menugaskan BKPM untuk mengkoordinasikan kegiatan OFDI Indonesia.

2.4.4. Thailand

Kebijakan *inward* FDI Thailand adalah ada pembatasan kepemilikan asing untuk sektor usaha yang menjadi kebijakan industri Thailand (seperti gula, besi beton). Kepemilikan asing di institusi keuangan dibatasi maksimal 25% , kecuali untuk penambahan modal. Beberapa sektor terdapat batasan 40% dimiliki nasional. Untuk yang tertutup harus mendapat izin dari Departemen Perdagangan.

Sementara kebijakan OFDI Thailand mensyaratkan bahwa investasi yang lebih dari 10 juta dollar AS harus disetujui oleh Bank Sentral.

Dalam penelitian Kee Hwee Wee¹⁰⁸, nampak bahwa OFDI oleh perusahaan Thailand walaupun adalah hal yang jamak, baru mendapatkan sedikit perhatian sampai saat ini, meskipun terjadi kenaikan proses internasionalisasi perusahaan Thailand sejak akhir 1980-an. OFDI Thailand sudah dimulai setidaknya dari tahun 1950-an (misalnya Bangkok Bank), tetapi tetap terbatas selama tiga dekade pertama.

OFDI dari Thailand menjadi lebih menonjol setelah akhir 1980-an. Sebagian besar investasi luar negeri selama tahap ini pergi ke beberapa tujuan kunci seperti AS, Hong Kong, Singapura dan Jepang. Keempat tujuan ini menyerap lebih dari 85% dari OFDI Thailand.

¹⁰⁸ Kee Hwee Wee, *Outward Foreign Direct Investment by Enterprises from Thailand*, (Transnasional Corporations, Vol. 16, No 1, April 2007), <http://www.unctad.org>, diakses tanggal 8 Mei 2008.

Tahap kedua, berlangsung antara tahun 1986 dan 1996 ketika OFDI Thailand meningkat pesat, baik dalam segi volume dan negara tujuan. OFDI Thailand berani lebih jauh masuk ke lokasi seperti Australia, Kanada dan Maladewa, serta negara-negara Eropa dan pusat-pusat keuangan lepas pantai (Kepulauan Cayman dan British Virgin Islands). Sementara meskipun AS dan Hong Kong terus menjadi tujuan utama, namun negara-negara Asia lainnya, khususnya negara-negara ASEAN, telah muncul sebagai tujuan yang signifikan. Meskipun wilayah ASEAN secara keseluruhan adalah tujuan utama OFDI Thailand, namun investasi di Cina tumbuh pesat. Kedekatan geografis dan afinitas budaya, bersama dengan hadirnya skema integrasi AFTA, memainkan peran dalam mempengaruhi konsentrasi geografis OFDI Thailand.

Keuntungan biaya dan ukuran pasar yang besar, memberikan kontribusi terhadap keinginan perusahaan Thailand untuk berinvestasi atau hadir di Cina dan negara-negara ASEAN. Secara khusus, biaya rendah di negara-negara ASEAN (Kamboja, Laos PDR, Myanmar dan Vietnam) amat menarik bagi perusahaan Thailand. Thailand merupakan sumber penting FDI untuk negara-negara tetangga. Pada periode 1997-2002, terjadi penurunan dramatis FDI masuk ke Thailand karena dampak krisis keuangan. Hal ini secara signifikan mempengaruhi kemampuan perusahaan Thailand untuk berinvestasi atau mempertahankan investasi mereka di luar negeri. Pada periode ini OFDI ke Cina, Eropa, Hong Kong dan AS menurun drastis. OFDI ke ASEAN selama periode ini juga turun sebesar 36% secara absolut, dibandingkan dengan periode sebelum krisis keuangan (1986-1996). Mulai tahun 2003, terjadi pemulihan OFDI ke luar. ASEAN dan China adalah penerima utama OFDI Thailand. FDI ke Eropa dan AS mulai pulih tetapi tetap pada tingkat yang rendah. Manufaktur adalah sektor yang paling aktif OFDI Thailand. Pertumbuhan ekonomi yang kuat di dalam negeri, keinginan meningkatkan posisi keuangan perusahaan dan kebutuhan untuk mengakses pasar baru adalah aspek-aspek yang mendorong perusahaan untuk berusaha di luar negeri. Serangkaian kebijakan baru untuk mendukung OFDI, penambahan fasilitas kelembagaan, pulihnya ekonomi dari krisis keuangan, meningkatkan kapasitas perusahaan Thailand untuk berusaha di luar negeri, dan ditambah dengan perjanjian perdagangan bebas bilateral dan regional membuat

prospek OFDI Thailand kedepan akan membaik. Sementara kebanyakan OFDI Thailand adalah dalam bentuk investasi *greenfield*, perusahaan Thailand juga memasuki pasar luar negeri melalui M & A, hal yang menunjukkan kemampuan keuangan perusahaan Thailand untuk memperoleh aset asing di luar negeri telah meningkat.

Thailand tidak memiliki kebijakan spesifik pada OFDI. Namun, Pemerintah telah mendorong perusahaan-perusahaan Thailand ke luar negeri sejak awal tahun 1990-an melalui berbagai langkah dan fasilitas dukungan kelembagaan. Hal itu juga mencakup penandatanganan 39 perjanjian investasi bilateral dan 56 perjanjian pajak berganda dengan mitra ekonomi. Pemerintah Thailand juga mendorong OFDI di bidang infrastruktur, di daerah kerjasama ekonomi sub-regional yang mana Thailand merupakan anggotanya. Daerah ini mencakup Greater Mekong Sub-regional (GMS), Teluk Benggala Inisiatif dan Chao Phraya -Ayeyawady¹⁰⁹.

Lembaga yang memberikan dukungan pada kegiatan OFDI Thailand adalah termasuk Badan Penanaman Modal (BoI), EXIM Bank of Thailand, Federasi Industri Thailand, Dewan Perdagangan Thailand, Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri. BoI Thailand telah mendukung FDI luar sejak 1991 dan mengatur misi investasi ke luar ke negara-negara tetangga, seminar mengenai OFDI di Thailand dan negara target. BoI juga memberikan panduan kepada perusahaan Thailand mengenai investasi luar negeri, terutama di negara-negara tetangga. Jasa lainnya dan dukungan yang diberikan oleh BoI termasuk penajaman rencana bisnis, dan penyediaan konsultan dengan keahlian dan pengalaman pada negara yang ditugaskan. The BoI telah menargetkan tiga kelompok industri untuk dipromosikan ke luar. Kelompok pertama terdiri dari industri yang dianggap mempromosikan Thailand sebagai pusat regional dan memiliki dampak yang bermanfaat pada perkembangan ekonomi Thailand, termasuk petrokimia, gas alam/energi, komponen otomotif, agribisnis dan komponen listrik. Kelompok kedua mencakup industri yang telah mengalami keterbatasan dalam perluasan pasar domestik, seperti perikanan, tekstil dan pakaian, peternakan dan perhiasan. Kelompok terakhir mencakup industri yang memiliki potensi global, seperti

¹⁰⁹ *Ibid*.

telekomunikasi, kawasan industri, konstruksi, pakan ternak, gula, plastik, produk kulit, pariwisata, dan bisnis restoran dan hotel¹¹⁰.

Sementara itu, Bank EXIM menyediakan berbagai layanan dan fasilitas pembiayaan untuk mendukung internasionalisasi perusahaan Thailand melalui OFDI. Juga ada program kemitraan dengan lembaga akademis terkemuka bersama Federasi Industri Thailand untuk meningkatkan kapasitas perusahaan Thailand untuk berinvestasi di luar negeri. Bank dan Federasi Industri Thailand Thailand bersama-sama mempromosikan investasi dan relokasi industri di luar negeri dengan memberikan fasilitas keuangan dan informasi mengenai peluang investasi di seluruh dunia. Departemen Keuangan juga memberikan dukungan untuk OFDI melalui penghindaran perjanjian pajak ganda dan keringanan pajak. Misalnya, pada Agustus 2004, Pemerintah menyetujui paket pajak baru, yang mencakup ketentuan yang memungkinkan Thailand merepatriasi keuntungan perusahaan dari luar negeri untuk memiliki kewajiban pajak waived. Departemen Luar Negeri memberikan bantuan pembangunan luar negeri dan kerja sama teknis untuk negara lain, khususnya negara-negara tetangga. Bantuan tersebut membantu meningkatkan profil Thailand di negara-negara penerima dan menciptakan peluang investasi bagi perusahaan Thailand. Terakhir, Federasi Industri Thailand dan Dewan Perdagangan Thailand Thailand juga aktif mendukung OFDI. Hal ini dilakukan dengan mengadakan kunjungan bisnis ke luar negeri, seminar bisnis dan dialog dengan asosiasi bisnis negara-negara lain¹¹¹.

Secara umum, motif utama OFDI adalah mencari pasar, yang mencakup memperluas jangkauan pasar, distribusi yang mendukung dan memperluas saluran perdagangan. OFDI Thailand sekarang ini bukan bermotif mencari efisiensi. Dalam hal penyebaran secara geografis, OFDI Thailand paling luas adalah di Asia. Dengan demikian, perusahaan transnasional (TNC) Thailand berperan dalam memperkuat integrasi regional dan kerja sama Selatan-Selatan. Stok OFDI Thailand naik dari 12,9 juta dollar AS pada tahun 1980 menjadi 3,9 miliar dolar AS pada tahun 2005. Sebagian besar OFDI Thailand dilakukan oleh perusahaan besar, seringkali perusahaan publik. Perusahaan kecil dan menengah (UKM)

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

kurang terlibat, tetapi ini tidak berarti bahwa mereka tidak berinvestasi di luar negeri. Afiliasi mereka cenderung bisa ditemukan di industri tertentu saja (misalnya usaha restoran) dan cenderung untuk berinvestasi di negara-negara tetangga karena kedekatan geografis dan afinitas budaya¹¹².

Charoen Pokphan adalah salah satu perintis multinasional ASEAN dari Thailand. Perusahaan peternakan ini sudah menanamkan modalnya ke Indonesia sejak tahun 1972. Sekarang dengan aset sekitar 1 miliar dollar AS, perusahaan ini adalah korporasi terbesar dibidangnya di Malaysia, Filipina dan Indonesia¹¹³. Sementara Banpu, sebuah perusahaan pertambangan, sudah hampir dua dasawarsa eksis di Indonesia. Dibidang kelistrikan, EGAT Thailand dengan investasi lebih dari 3 miliar dollar AS di tahun 2007, di Laos, Kamboja dan Myanmar, merupakan investor kelistrikan terbesar dikawasan Indo China¹¹⁴. Produksi listrik EGAT di negara-negara tersebut diekspor ke Thailand. Thailand juga sedang agresif memberikan berbagai fasilitas guna mendorong dunia usahanya berinvestasi di Vietnam dalam bidang bisnis infrastruktur, agrikultur dan perikanan¹¹⁵.

Tabel II.14 berikut menunjukkan bahwa mayoritas OFDI Thailand tidak ditempatkan di kawasan ASEAN, tetapi meyebar ke China, AS dan Eropa. Hanya 35,5% OFDI Thailand pergi ke kawasan ASEAN.

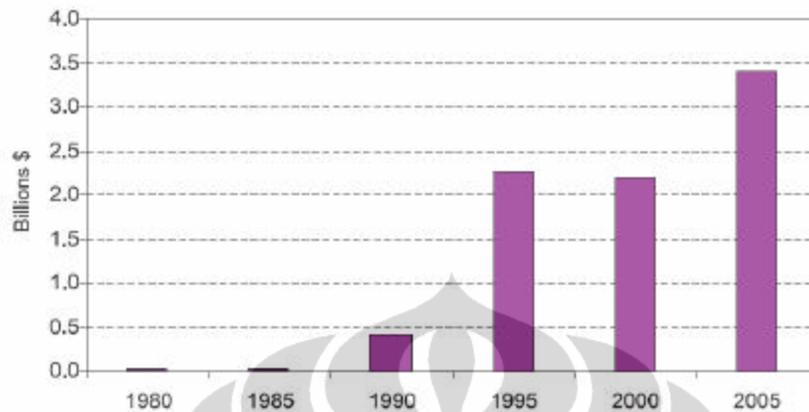
¹¹² *Ibid.*

¹¹³ <http://www.thejakartapost.com/news/2008/03/16/thai-investors-smalltomedium-class-joining-biggies-ri.html>, diakses tanggal 14 Juli 2009.

¹¹⁴ <http://internationalrivers.org/en/southeast-asia/perspective-mekong-region-new-financiers-and-familiar-problems>, diakses tanggal 15 Juli 2009.

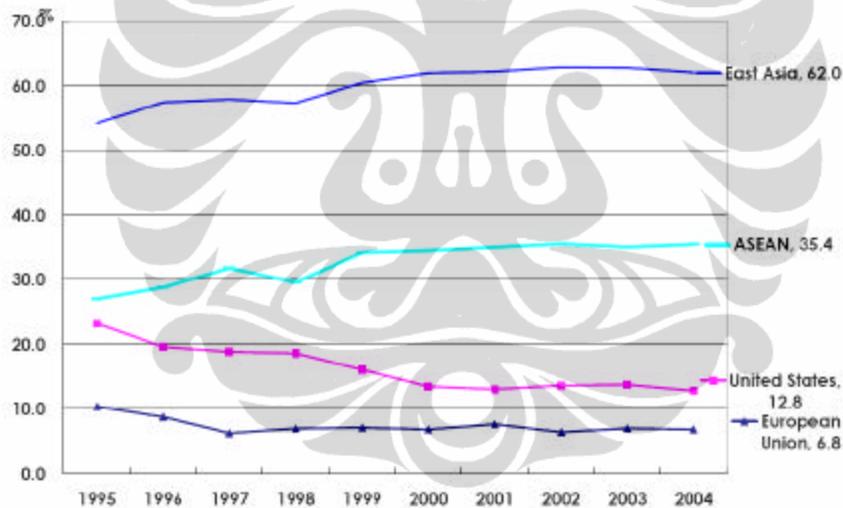
¹¹⁵ <http://english.siamdailynews.com/asia-news/southeastern-asia-news/thailand-news/foreign-minister-encourages-thai-investors-to-do-business-in-vietnam.html>, diakses tanggal 15 Juli 2009.

Tabel. 2.13
OFDI Thailand 1980-2005
 (dalam miliar dollar AS)



Sumber: UNCTAD

Tabel 2.14
Sebaran Geografis OFDI Thailand 1995-2004



Sumber: UNCTAD

2.4.5. Filipina

Kebijakan *inward* FDI Filipina adalah bergantung pada sektor dalam Daftar Negatif Investasi (DNI), pada beberapa sektor dapat mencapai 100% (khususnya yang berorientasi ekspor). DNI ditetapkan oleh konstitusi atau oleh alasan keamanan, pertahanan, resiko kesehatan dan moral serta perlindungan UKM. Sementara kebijakan OFDI Filipina dinyatakan bebas untuk investasi dengan dana sendiri. Sementara investasi yang dibiayai perbankan domestik harus disetujui

oleh Bank Sentral dan maksimal 6 juta dollar AS per investor per tahun. Menurut CatatanUNCTAD, disebutkan bahwa pada tahun 1990, stok OFDI Filipina adalah 406 juta dollar AS, meningkat menjadi 1,308 miliar dollar AS ditahun 1995, menjadi 2,044 miliar dollar AS ditahun 2000 dan 5,573 miliar dollar AS ditahun 2007. Sementara *net flow* OFDI-nya adalah rata-rata 151 juta dollar AS antara ditahun 1995-2000, naik menjadi 579 juta dollar AS ditahun 2004, turun di tahun 2005 menjadi 103 juta dollar AS dan melonjak naik menjadi 3,442 miliar dollar AS ditahun 2008.

Tidak ada peraturan hukum yang spesifik untuk OFDI di Filipina. Satu-satunya yang dapat dianggap merujuk pada hal tersebut adalah peraturan yang diimplementasikan tahun 1979. Aturan itu mengatakan bahwa investasi diluar negeri harus dicatatkan di Bank Senral. Selain hal-hal tersebut, OFDI dievaluasi dengan dasar penggunaan, penyimpanan dan pendapatan devisa asing, promosi produk dan jasa Filipina, dan manfaat potensial untuk para pekerja Filipina; faktor-faktor inilah yang menjadi dasar untuk melaksanakan evaluasi perusahaan yang bersifat orientasi-ekspor. Sebagai pendorong untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan OFDI, diberlakukanlah intensif dengan berlakunya *Export Incentives Act*. UU ini lebih spesifik dan lebih memberi insentif pada perusahaan konstruksi Filipina. POCB memformulasikan strategi-strategi dan program untuk peningkatan industri konstruksi luar negeri Filipina dan mengatur partisipasi kontraktor di proyek-proyek konstruksi luar negeri. POCB menyeleksi perusahaan konstruksi untuk pekerjaan-pekerjaan luar negeri untuk mempertahankan iklim kompetitif. Juga untuk memacu pengumpulan sumber-sumber daya diantara para kontraktor untuk menghindari kompetisi yang merusak. Pemerintah juga mendorong perusahaan-perusahaan yang secara substansial berkontribusi dalam pendapatan negara untuk devisa asing, agar mereka dapat meneruskan ekspansi di luar negeri dengan sedikit bantuan dari Pemerintah. Kasus Grup Landoil menjadi contoh berharga. Selain penerimaan substansial devisa asing, perusahaan itu tetap mempertahankan pinjaman dari kreditur-kreditur luar negeri di dalam basis yang bersih dan aman, dan tidak membutuhkan pemerintahan Filipina atau garansi dari bank swasta. Variabel spesifik lain untuk menjelaskan keinginan TNC Filipina melakukan OFDI adalah kemiripan antara sistem budaya dan ekonomi. Hal ini

nampak pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pasar Asia Tenggara. Jaringan kekerabatan dan etnik juga menjadi latar belakang operasi perusahaan Filipina di Asia Tenggara. Ketidaktepatan dan pembatasan pasar modal, serta pasar finansial di Filipina yang tidak berkembang juga merupakan alasan yang masuk akal mengapa OFDI Filipina pergi ke AS dan Hongkong. Pengembalian yang rendah dan biaya modal yang tinggi digabung dengan situasi politik yang tidak menentu menjadi pemicu untuk OFDI Filipina. Pada tahun 1980-an Hongkong terlihat sebagai daerah tujuan favorit dari investasi Filipina dikarenakan Hongkong mempunyai pusat finansial yang maju. Kebanyakan bank-bank di Filipina, termasuk yang dimiliki oleh pemerintah, mempunyai juga cabang operasi di Hongkong¹¹⁶.

Dari uraian pada Bab 2 diatas dapat kita lihat bahwa telah banyak upaya untuk meningkatkan investasi intra-ASEAN. Namun belum membuahkan hasil yang diharapkan. Padahal ASEAN-5 telah menjadi negara sumber OFDI yang cukup signifikan. Tabel II.15 berikut ini menunjukkan kumulatif OFDI ASEAN-5 adalah 300,574 miliar dollar AS. Dibandingkan dengan seluruh ASEAN yang 301,961 maka OFDI negara-negara ASEAN-5 mencakup 99,54 % dari seluruh stok OFDI ASEAN hingga tahun 2008.

Tabel 2.15
Perbandingan Kumulatif OFDI Negara-Negara ASEAN-5 terhadap OFDI ASEAN 2008

Negara	Kumulatif OFDI (dalam miliar dollar AS)	Kumulatif OFDI (dalam %)
Indonesia	27,233	9,61
Singapura	189,094	62,80
Malaysia	67,58	22,38
Thailand	10,857	3,59
Filipina	5,81	1,92
Brunei Darussalam	0,732	0,24
Vietnam	0,335	0,11
Myanmar	0	0
Laos	0,02	0,006
Kamboja	0,3	0,09
Total	301,961	100

Sumber: UNCTAD 2008

¹¹⁶ <http://unctc.unctad.org/data/stescap331e.pdf>, diakses tanggal 20 Juli 2009.

Singapura berperan sebagai negara yang paling aktif melakukan investasi-intra ASEAN. Namun tak satupun dari negara ASEAN-5 yang menempatkan kawasan ASEAN sebagai wilayah utama tujuan OFDI-nya. Semua negara ASEAN-5 menempatkan ASEAN bukan sebagai prioritas untuk OFDI-nya.

Tabel 2.16
Posisi Penempatan OFDIintra-Asean 5
(2007)

Negara	OFDI di Asean (miliar dollar AS)	Total OFDI Stok (miliar dollar AS)	OFDI di Asean (%)
Indonesia	4,67	21,33	21,9
Malaysia	9,19	58,23	15,7
Filipina	0,75	5,57	13,4
Singapura	33,8	180,16	18,7
Thailand	2,54	8,02	31,7

Sumber: Data diolah dari Asean FDI Database 2008 dan UNCTAD Statistic Handbook 2009.

Dari tabel diatas nampak bahwa hingga tahun 2007, tak ada negara ASEAN yang OFDI-nya mencapai angka 50% untuk intra-ASEAN. Strategi untuk meningkatkan investasi melalui peningkatan perdagangan juga sulit diwujudkan, karena ternyata nilai perdagangan intra-ASEAN sulit naik secara signifikan. Sektor-sektor yang tumbuh untuk investasi intra ASEAN masih bisa dikatakan terbatas.

Tanpa partisipasi OFDI yang lebih aktif didalam kawasan dari negara-negara ASEAN sendiri, ASEAN nampaknya akan membiarkan proses integrasi ekonominya dikendalikan oleh *inward* FDI dari luar kawasan yang tidak bisa diharapkan untuk memiliki peran dalam membangun keterkaitan intra-kawasan. Kegiatan OFDI yang bertipe mencari pasar nampaknya dapat menjadi stimulus bagi investasi intra ASEAN.

Mengingat rasio investasi intra-ASEAN kurang dari 20% dan bila dibandingkan dengan 66 % investasi intra-EU, potensi untuk investasi intra-regional masih sangat besar. Tendensi untuk berinvestasi di dalam wilayah kawasan ini dapat teralih dengan peningkatan daya tarik dari kemajuan ekonomi di negara-negara non-ASEAN, terutama Cina. Kebangkitan Cina dan pada tingkat yang lebih rendah India, dapat menjadi tantangan utama bagi tujuan ASEAN

untuk meningkatkan tingkat investasi intra-kawasan. Karena itu, berikutnya di Bab III akan diuraikan mengenai dinamika Asia Timur dan perkembangan China, sebagai hal yang amat berpengaruh pada dinamika investasi intra-ASEAN.

